

No.2, Desember 2007

ISSN 1978-0052



JURNAL PENELITIAN

BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

TRANSFORMASI MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP
(Kajian Perilaku Masyarakat Kampus dan Kurikulum Pendidikan Lingkungan
di Perguruan Tinggi Yogyakarta)

MODEL PENGEMBANGAN PARAWISATA BERBASIS MASYARAKA DI KOTA YOGYAKARTA

**KESIAPAN MASYARAKAT CODE UNTUK MENINGKATKAN KECAKAPAN HIDUP
DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI CINDERAMATA KHAS YOGYAKARTA**

**RELEVANSI MATERI PEMBELAJARAN BAHASA ASING DI SMA
DENGAN PELESTARIAN BUDAYA DAN PENGEMBANGAN PARAWISATA KOTA YOGYAKARTA**

STUDI TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

**PENCiptaan IKLIM LINGKUNGAN PEMBELAJARAN YANG INKLUSIF MELALUI PENETAPAN
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SD NEGERI TAMANSARI 1 YOGYAKARTA**

2

DAFTAR ISI

- **TRANSFORMASI MASYARAKAT MELLAUI
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP
(Kajian Perilaku Masyarakat Kampus dan Kurikulum
Pendidikan Lingkungan di Perguruan Tinggi Yogyakarta)** 3 - 4
- **MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS
MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA** 5 – 14
- **MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS
MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA** 15 – 23
- **KESIAPAN MASYARAKAT CODE UNTUK
MENINGKATKAN KECAKAPAN HIDUP DENGAN
MEMANFAATKAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI
CINDERAMATA KHAS YOGYAKARTA** 24 – 35
- **RELEVANSI MATERI PEMBELAJARAN BAHASA
ASING DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DENGAN PELESTARIAN BUDAYA DAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA
YOGYAKARTA** 36 – 39
- **STUDI TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP** 40 - 42

TRANSFORMASI MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

(Kajian Perilaku Masyarakat Kampus dan Kurikulum Pendidikan Lingkungan
di Perguruan Tinggi Yogyakarta)

Oleh : Rhoma Dwi Yuliantri, dan Yasin Yusuf

Pokok Temuan

- a. Belum semua perguruan tinggi memiliki mata kuliah lingkungan hidup sebagai mata kuliah umum. Mata kuliah lingkungan hidup sebagai mata kuliah umum baru ditemui di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu pun telah berubah statusnya dari mata kuliah wajib menjadi mata kuliah pilihan. Di Universitas lainnya (UGM, UPN, UMY, UAD) ditemui mata kuliah lingkungan hidup tapi pada jurusan tertentu, dan mayoritas bersifat integratif dengan spesialisasi jurusan.
- b. Kurikulum lingkungan hidup di perguruan tinggi DIY masih menekan segi memorize.
- c. Pengembangan kurikulum lingkungan hidup kurang komprehensif. Indikator komprehensif bila materi lebih tiga unsur lingkungan, misal, kependudukan, udara, air, lahan atau ruang sudah diberikan. Maka, kurikulum sudah masuk kategori komprehensif. Mayoritas responden sebanyak 62,5 % responden (mahasiswa UNY) menyatakan unsur materi kependudukan paling menonjol. Dari sampel di fakultas tertentu di Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum sudah beragam (air, udara, tanah, ruang dan kependudukan).
- d. Pengembangan kurikulum lingkungan hidup kurang aplikatif. Mayoritas responden 83,33 % mahasiswa di UNY dan 85,71 % mahasiswa di UGM menyatakan belum pernah studi lapangan pada pembelajaran mata kuliah lingkungan, meskipun sudah menerapkan problemsolving.
- e. Menurut responden di UGM 85,71 % pengembangan kurikulum lingkungan sudah menggunakan metode pembelajaran problem solving terhadap masalah-masalah lingkungan yang kontekstual, sedangkan di UNY hanya 50%
- f. Minimnya penguasaan materi pengajar dalam bidang lingkungan secara komprehensif. dari hasil wawancara dengan dosen lingkungan diketahui bahwa latar belakang pendidikan pengajar bukan spesialisasi lingkungan, sehingga ketika menyampaikan materi cenderung diwarnai latar belakang pendidikannya.
- g. Belum optimalnya daya dukung pihak kampus terhadap lingkungan. Hal ini dilihat dari kriteria manajemen kampus, kriteria fisik sekolah, dan kriteria pemberdayaan warga sekolah. Kriteria untuk manajemen sekolah meliputi kelembagaan, peraturan, program kerja, anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembelajaran siswa kerjasama antar kemitraan, unit-unit kegiatan siswa, monitoring dan evaluasi. Dari kedua perguruan tinggi yang di survey, manajeen UNY sudah optimal dan berfungsi dengan baik, sedangkan kriteria fisik sekolah dinilai dari kebersihan lingkungan kampus, kamar mandi/WC, kebersihan halaman, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah cair, ruang terbuka hijau, tata tanaman dan efisiensi penghematan energi. Semua komponen kriteria fisik di UNY masuk kategori sedang, begitu pula di UGM. Sedangkan dari Indikator pemberdayaan sekolah ketersediaan informasi di UNY dan UGM masuk kategori belum optimal.

- h. Pendidikan lingkungan hidup belum mampu mentranformasikan kepedulian dan tingkah laku mahasiswa terhadap lingkungan. Tingkat kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sebagai tanggung jawab sosial agak rendah hanya 40-41,38% responden yang menjawab “ya” saat ditanya, bila melihat sampah tidak pada tempatnya apakah mereka akan mengambil dan membuangnya di tempat sampah? Meskipun dilihat dari tanggung jawab pribadi mahasiswa di Yogyakarta terhadap kebersihan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan masih dalam kategori baik, 72-82,76% membuang sampah pada tempatnya, 72-90% menggunakan masker dan jaket saat mengendarai sepeda motor, dan 44-60% melakukan servis sepeda motor setiap bulan (2000 km). Mahasiswa juga kritis terhadap lingkungan kampus mereka, taman dan jalur hijau di kampus sudah memadai artinya lebih dari 70% merasa lingkungan kampus mereka belum nyaman. Mereka sepakat (70-72,41%) bila kampus dijadikan kawasan bebas polusi, kendaraan bermotor diparkir di pinggir kampus dan kampus menyediakan “sepeda onthel” untuk kendaraan di lingkungan kampus.
- i. Ternyata tanggung jawab pribadi, sikap kritis, dan akseptabilitas “wacana ideal” yang tinggi tidak selalu diikuti kepedulian dan tanggung jawab sosial yang tinggi pula.

Rekomendasi

Transformasi masyarakat melalui pendidikan hanya bisa dicapai bila :

- a. Mata kuliah lingkungan menjadi mata kuliah umum/wajib yang berlaku untuk semua jurusan,
- b. Mata kuliah lingkungan juga harus diintegrasikan dengan kurikulum spesialisasi jurusan,
- c. Belajar lingkungan harus 'mengalami' apa yang dipelajari, bukan 'mengetahuinya', dalam artian studi kasus dan studi lapangan harus diperbanyak. (penelitian ini juga menyajikan salah satu model studi kasus dan studi lapangan yang dituangkan dalam bentuk film sebagai materi pembelajaran lingkungan, film ini mengangkat aktual polusi udara di Yogyakarta, seluruh shareholder disurvei, anatomi polusi udara juga diungkap, termasuk budaya masyarakat),
- d. Untuk mengatasi pendekatan lingkungan yang parsial dalam pembelajaran lingkungan maka perlu metode team teaching.

MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh : Isnaini Muallisin, SIP

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata, sebagaimana yang dikatakan John Naisbitt dalam bukunya *Global Paradox*, dapat dikategorikan sebagai industri terbesar dunia (the world's largest industry). Sekitar 8 persen dari ekspor barang dan jasa, pada umumnya, berasal dari pariwisata. Di Asia Tenggara, berdasarkan catatan WTO, pariwisata menyumbang devisa Negara sebesar 10-12 persen dari DGP dan 7-8 persen dari total employment (etyanto P,2005:11).

Indonesia sendiri, sebagai Negara urutan kedelapan, dikunjungi 5,064 juta orang dengan perolehan devisa 5,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2000, meski pada akhir tahun 1997 badai krisis melanda Indonesia. Sayang, ancaman aksi terorisme 11 september 2001, bom Bali, JW Mariot, Kuningan memicu penurunan sektor pariwisata secara drastis. Pada tahun 2003, Indonesia hanya dikunjungi 4,5 juta orang dengan penghasilan 4,3 miliar dolar Amerika (Pikiran rakyat, 13 Desember 2004).

Badai krisis ekonomi dan terorisme yang mengancam dunia pariwisata, seyogyanya, mendorong pariwisata Indonesia melakukan repositioning dan revitalization. Krisis ekonomi jelas berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang. Terorime berpengaruh terhadap rasa aman dan kenyamanan para wisatawan. Jika tidak ada upaya perbaikan, dapat dipastikan, dunia pariwisata akan terpuruk. UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional yang mengamanatkan dunia pariwisata untuk turut serta memulihkan perekonomian nasional dan memulihkan citra pariwisata Indonesia dimata internasional akan semakin berat untuk dilaksanakan.

Selain itu, setelah diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pengelolaan pariwisata yang sebelumnya tersentralisasi di pusat diambil alih oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat untuk mengembangkan pariwisata. Sehingga, kecenderungan pengembangan pariwisata daerah berjalan sendiri, tidak tahu apa yang harus diperbuat (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2001: 2), tidak efektifnya perencanaan pariwisata diberbagai tingkat, dan belum tersosialisasinya misi pengembangan pariwisata ke berbagai secktor, instansi dan lembaga terkait lainnya (Timothy, 1998: 64-65).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka di tahun 2004 program pengembangan pariwisata memprioritaskan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antar pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan community-based tourism (CBT), memperluas dan mengembangkan pasar pariwisata serta mempertahankan, mengoptimalkan peranan pariwisata yang berdasarkan pada konsep kehidupan berkesinambungan (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2001: 2).

Dalam peta kepariwisataan nasional, potensi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat kedua setelah Bali. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa faktor yang menjadi kekuatan pengembangan wisata di DIY. Pertama, berkenaan dengan keanekaragaman objek. Dengan berbagai predikatnya, DIY memiliki keanekaragaman objek wisata yang relatif menyeluruh baik dari segi fisik maupun non fisik, disamping kesiapan sarana penunjang wisata. Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta relatif memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, berkaitan dengan ragam spesifikasi objek dengan karakter mantap dan unik seperti kraton, candi prambanan, kerajinan perak di Kotagede. Spesifikasi objek ini masih didukung oleh kombinasi objek fisik dan non fisik dalam paduan yang seras. Kesemua faktor tersebut memperkuat daya saing DIY sebagai propinsi tujuan utama primary destination) tidak saja bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan

mancanegara. Sebutan Prawirotaman dan Sosrowijayan sebagai 'kampung Internasional' membuktikan kedekatan atmosfer Yogyakarta dengan 'selera eksotisme' wisatawan mancanegara.

Kota Yogyakarta yang memiliki cukup banyak objek wisata dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu objek wisata budaya dan objek wisata buatan (konveksi dan wisata belanja). Potensi objek dan daya tarik wisata di Yogyakarta adalah museum, bangunan bersejarah, bangunan budaya, kelompok kesenian/atraksi wisata dan kawasan malioboro. Yang termasuk dalam kategori objek wisata budaya diantaranya adalah benteng vredeburg, Kraton Yogyakarta, taman sari, kraton pakualaman dan makan kotagede. Sedangkan yang masuk dalam kategori objek wisata buatan diantaranya adalah museum Sono Budaya, museum Sasono Wirotomo, museum AD (Dharma Wiratama), museum perjuangan, BIOLOGI UGM, purawisata, kebun plasma pisang, kebun binatang Gembira Loka, dan Kali Code (Profil Kota Yogyakarta, 2003:10).

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2000 diketahui bahwa jumlah wisatawan yang mengunjungi kota Yogyakarta terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 64.599 orang dan wisatawan nusantara (wisnu) sebanyak 790.716 orang (profil Kota Yogyakarta 2003: 11).

Dengan adanya potensi wisata diatas, perlibatan partisipasi masyarakat dalam pariwisata di Kota Yogyakarta masih minim. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Condroyono, kepala Baparda DIY yang menyatakan bahwa sense of tourism masyarakat DIY, termasuk birokrasinya masih sangat rendah. (Kedaulatan Rakyat, 13 juli 2005). Sebagai contoh konkrit adalah pengembangan Kali Code sebagai kawasan wisata di Yogyakarta, hingga kini masih terbengkalai. Padahal, rencana itu telah ditetapkan pemerintah daerah setempat sejak 16 tahun silam. Selain masalah dana, kesadaran warga sekitar yang minim untuk menjaga kebersihan sungai juga menjadi penyebab (Mrifica, 2004).

Dalam pengembangan pariwisata selama ini budaya masyarakat setempat lebih dilihat sebagai objek, sehingga mengakibatkan "menjual budaya" dengan adanya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat ditekankan kesetaraan antara masyarakat dengan turis dan berkembangnya budaya sebagai jati diri bangsa. Masyarakat sendiri memberikan penjelasan tentang budaya dan kebiasaan setempat. Dengan demikian, turis lebih mengerti tentang kebudayaan, kebiasaan dan kecenderungan mengikuti atau patuh pada aturan yang berlaku di tempat yang dikunjungi. Pengalaman dapat membantu anda saling pengertian dan menghargai nilai-nilai yang berbeda yang pada gilirannya mendukung masyarakat untuk lebih terbuka dan memberi penjelasan tentang pengetahuan lokal kepada turis (CIFOR,2004: 4).

Untuk itulah, perlu dilakukan penelitian dengan melakukan need assessment, dan formulasi model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, supaya pengembangan dan konservasi wisata di Kota Yogyakarta dapat berjalan secara maksimal, efektif, dan efisien.

B. Permasalahan

Berdasarkan pemikiran diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah model yang efektif bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mencari model yan efektif bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat dijadikan proses pembelajaran bagi masyarakat dalam melestarikan konservasi cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta.
2. Dengan adanya model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dapat membantu pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pariwisata yang partisipatif dan dapat

menjadikan contoh dalam pengembangan konservasi cagar budaya dan pariwisata berbasis masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan Kota Yogyakarta pada khususnya.

E. Telaah Pustaka

1. Community- Based Tourism (CBT)

Dalam buku pegangan yang diterbitkan REST (1997), dimuat hal-hal konseptual dan praktis dari CBT, Menurut REST, secara terminologis, pelibatan partisipasi masyarakat dalam proyek pengembangan pariwisata mempunyai banyak nama, yakni Community-Based Tourism (CBT), Community-Based Ecotourism (CBET), Agrotourism, Eco and Adventure Tourism dan homestay. Dikalangan akademik, belum ada konsensus terhadap istilah-istilah dari beragam tipe pariwisata ini.

Adapun definisi CBT adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (local way of life). Dengan demikian, CBT sangat berbeda dengan pariwisata massa (mass tourism). CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal (Pinel: 277) CBT bukanlah bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan profil bagi para investor. CBT lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat dan sumber daya lingkungan (environmental resources). CBT lahir dari strategi pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat rural/lokal.

Konsep CBT mempunyai prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai tool of community development bagi masyarakat lokal, yakni:

- Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat,
- Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek,
- Mempromosikan kebanggaan masyarakat,
- Meningkatkan kualitas hidup,
- Menjamin sustanbilitas lingkungan,
- Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik,
- Membantu mengembangkan cross-cultural learning,
- Menghormati perbedaan-perbedaan kultural dan kehormatan manusia,
- Mendistribusikan keuntungan secara adil di antara anggota masyarakat,
- Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat.

2. Model Pengembangan CBT

Buku, riset, dan survey tentang pelibatan masyarakat dalam pariwisata atau community-based tourism telah banyak dilakukan. Ketertarikan terhadap partisipasi masyarakat dalam dunia pariwisata tampaknya berakar di Amerika awal 1970-an. Gunn (1972: 66) mengkampanyekan penggunaan forum bersama yang dihadiri oleh pemimpin masyarakat, konstituen, perencana pariwisata yang diharapkan. Gunn berpendapat bahwa keuntungan dari community approach yang diadvokasikannya dapat bermanfaat bagi penduduk dan para pengunjung.

Kemudian yang pertama kali mempopulerkan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah Murphy (1985). Dia berpendapat, bahwa produk pariwisata secara lokal diartikulasikan dan dikonsumsi, produk wisata dan konsumennya harus visible bagi penduduk lokal yang seringkali sangat sadar terhadap dampak turisme. Untuk itu, pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal, sebagai bagian dari produk turisme, lalu kalangan industri juga harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Sebab, masyarakat lokallah yang harus menanggung dampak kumulatif dari perkembangan

wisata dan mereka butuh untuk memiliki input yang lebih besar, bagaimana masyarakat dikemas dan dijual sebagai produk pariwisata. (Murphy, 1985: 16)

Getz dan Jamal (1994) mengkritik model Murphy, sebab tidak menawarkan blueprint untuk mengimplementasikannya dalam bentuk konkrit. Konsep Murphy dalam implementasinya masih terdapat berbagai masalah. Partisipasi publik dilihat sebagai alat untuk memelihara integritas dan otentisitas dan juga kemampuan kompetitif produk pariwisata (Gunn, 1994). Tetapi, ketika partisipasi publik muncul, perencanaan tujuan pariwisata tetap terpusat pada inters-inters komersial dan pelibatan masyarakat sangat kecil. Dan tujuan dari perencanaan pariwisata model ini lebih terfokus pada upaya melestarikan keunikan dan daya tarik wisata, dan pada faktanya lebih top-down, bersifat bisnis, dan dengan pendekatan yang berorientasi ekonomi (bahaire and Elliott-White, 1999: 248).

Model pendekatan masyarakat (community approach) menjadi standar baku bagi proses pengembangan pariwisata di daerah pinggiran, dimana melibatkan masyarakat didalamnya adalah faktor yang sangat penting bagi kesuksesan produk wisata. D'amore memberikan guidelines model bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yakni;

- Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang dilakukan penduduk lokal (resident)
- Mempromosikan dan mendorong penduduk lokal
- Pelibatan penduduk lokal dalam industri
- Investasi modal lokal atau wirausaha sangat dibutuhkan
- Partisipasi penduduk dalam event-event dan kegiatan yang luas
- Produk wisata untuk menggambarkan identitas lokal
- Mengatasi problem-problem yang muncul sebelum pengembangan yang lebih jauh

Poin-poin diatas merupakan ringkasan dari community approach. Masyarakat lokal harus "dilibatkan", sehingga mereka tidak hanya dapat menikmati keuntungan pariwisata dan selanjutnya mendukung pengembangan pariwisata yang mana masyarakat dapat memberikan pelajaran dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai sejarah dan keunikan yang dimiliki.

Kemudian pada 1990-an, seiring dengan pengembangan interest dalam mengembangkan produk pariwisata yang berkesinambungan, kebutuhan untuk menggunakan bentuk partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang sangat urgen. Bentuk partisipasi masyarakat menjadi esensial bagi pencapaian pariwisata yang berkelanjutan dan bagi realisasi pariwisata yang berkualitas. Getz dan Jamal (1994) mengembangkan pondasi teoritis pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata dan menganalisis watak dan tujuan dari model kolaborasi (collaboration) yang berbeda dari model kerjasama (cooperation). Mereka berdua mendefinisikan kolaborasi sebagai "sebuah proses pembuatan keputusan bersama diantara stakeholders otonom dari domain interorganisasi untuk memecahkan problem-problem atau me-manage isu yang berkaitan dengan pariwisata (Getz dan Jamal, 1994: 155). Proses kolaborasi meliputi ; 1) Problem Setting dengan mengidentifikasi stakeholders kunci dan isu-isu. 2) Direction Setting dengan berbagi interpretasi kolaboratif, mengapresiasi tujuan umum. 3) strukturisasi dan implementasikan, 4) institusionalisasi.

Supaya pelaksanaan CBT dapat berhasil dengan baik, ada elemen-elemen CBT yang musti diperhatikan, yakni:

- Sumberdaya alam dan budaya,
- Organisasi-organisasi masyarakat,
- Manajemen,
- Pembelajaran (Learning).

Pembelajaran disini bertujuan untuk membantu proses belajar antara tuan rumah (host Community) dan tamu (Guest), mendidik dan membangun pengertian antara cara hidup dan budaya yang beragam, meningkatkan kesadaran terhadap konservasi budaya dan sumberdaya diantara turis dan masyarakat luas (REST,1997).

F. Temuan dan Analisis

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata

Dilihat dari karakter penduduk dan kondisi masyarakat, Prawirotaman dan Tamansari memiliki perbedaan yang unik, Prawirotaman adalah kampung internasional dimana para turis mancanegara biasanya tertarik untuk menginap di hotel-hotel di kampung Prawirotaman. Disini, tersedia hotel-hotel kelas melati yang menyediakan fasilitas lengkap standar internasional; money changer, kafe, artshop. Hotel-hotel dan sarana penunjang wisata lainnya dimiliki oleh para pemodal dari luar Prawirotaman.

Selain itu, para pekerja yang ada di 'kampung internasional' tersebut pada umumnya bukan penduduk lokal. Mereka adalah para profesional di bidangnya masing-masing yang direkrut secara profesional pula. Hal ini mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata sangat rendah, bahkan masyarakat terkesan acuh tak acuh. Bila ditelusuri lebih dalam, terdapat kesenjangan kesejahteraan masyarakat yang sangat mencolok. Di kampung Prawirotaman bagian dalam, tempat tinggal masyarakat terkesan kumuh, saling berhimpitan, dan kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak pemuda menganggur, tidak mempunyai life skill yang memadai, apalagi dalam bidang pariwisata. Pemandangan ini sangat kontras dengan hotel-hotel dan fasilitas penunjang wisata lainnya yang ramai dikunjungi para wisatawan mancanegara.

Hubungan masyarakat setempat dengan pengelola hotel, agen wisata, guide juga sangat buruk. Para pengelola wisata itu tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pengembangan 'kampung internasional' tersebut. Bagi para pengelola, kampung prawirotaman adalah lading bisnis yang independent dari keterlibatan penduduk lokal, disisi lain, adalah bagian terpisah dari industri pariwisata yang berlangsung di kampung tersebut. Akibatnya, para pengelola tidak berupaya melibatkan penduduk lokal dalam bisnis wisata mereka.

Bila kondisi ini tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan dikemudian hari kampung Prawirotaman akan kehilangan dukungan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sudah saatnya masyarakat setempat dilibatkan dalam pengembangan pariwisata di Prawirotaman. Misalnya, pemerintah kota melakukan pelatihan-pelatihan pemandu wisata, training bahasa kepada pemuda dan penduduk lokal. Saling, partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Prawirotaman masih sangat rendah. Masyarakat setempat hanya dilibatkan pada hal-hal yang bersifat teknis bukan pada pemikiran dan pengambilan keputusan.

Lain halnya dengan Tamansari, situs Tamansari sepenuhnya dikelola dan dimiliki oleh keraton Yogyakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Gusti Hadiwinoto (wawancara, 12 Oktober 2005), situs pemandian Sultan tempo dulu ini lebuah dulu ada dari pada masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat Tamansari merupakan multiplier effects dari Tamansari. Dengan demikian, dengan alasan historis dan kultural ini pengelolaan dan pengembangan Tamansari tidak melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Sebagai multiplier effects dari keberadaan Tamansari, dalam masyarakat Tamansari dan sekitarnya terdapat komunitas perajin batik dan sanggar tari. Komunitas ini menjadi daya tarik penunjang wisata Tamansari tersendiri, komunitas-komunitas yang ada di Tamansari tidak di-management dengan baik sehingga perannya sekedar sebagai penunjang kegiatan pariwisata di situs Tamansari. Pada tahun 1980an, Tamansari merupakan disentra kerajinan batik yang menjadi jujukan setiap pengunjung taman sari. Sayangnya, karena terjadi persaingan yang sangat menyedihkan di antara pengusaha, akhirnya sentra batik terpuruk (wawancara dengan Hadjir Dikdodarmodjo, tokoh masyarakat Tamansari pada 19 September 2005).

Selain itu adanya guide-guide liar yang berasal dari luar Tamansari menjadi persoalan tersendiri. Penduduk setempat, sebenarnya, tidak menginginkan mereka turut menerangkan historisitas Tamansari. Sebab, masyarakat setempatlah yang seharusnya menerangkan dan

menjelaskan kepada setiap pengunjung yang datang. Oleh karena itu, mereka berharap kepada pemerintah untuk menata ulang guide-guide liar tersebut, dan selanjutnya menyerahkan proses pengelolaan pariwisata seperti guide, parker dan sebaiknya kepada masyarakat.

Tetapi, pemerintah tampaknya belum memperhatikan persoalan-persoalan pengelolaan Tamansari secara lebih menyeluruh. Pemerintah selama ini hanya memperhatikan pembangunan kembali puing-ping Tamansari, belum menyentuh pada pelibatan partisipasi masyarakat setempat dalam proses pembangunan tersebut. Kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Tamansari juga bersifat stopdown dengan memberikan insentif, dan seperangkat program pemerintah terkait dengan program wisata tamnsari. Pendekatan yang topdown ini, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, pada akhirnya tidak berjalan dengan baik dan tidak menyentuh kesadaran berpariwisata masyarakat setempat (wawancara dengan Hadjir Dikdoarmodjo, tokoh masyarakat Tamansari pada 19 September 2005).

Program-program yang diajukan pemerintah untuk masyarakat Tamansari justru menjadikan perkembangan masyarakat tidak menentu. Padahal, program tersebut kerap kali tidak sesuai dengan kondisi dan kemauan masyarakat setempat. Masyarakat sebenarnya menginginkan Tamansari dijadikan kampung pariwisata dimana para turis dapat menginap di Tamansari dan belajar kerajinan batik serta kursus menari. Akan tetapi, karena ada aturan tertulis dan tidak tertulis bahwa turis mancanegara tidak boleh menginap dan tinggal di wilayah kraton, maka hal tersebut sulit diwujudkan (wawancara dengan Ahmad Subandrio, ketua RW.03 Ngadisuryan, pada 20 September 2005).

2. Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Dalam merumuskan model yang efektif untuk mehembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya yang berada dikawasan Tamansari dan Prawirotanan terdapat kesamaan cara pandang dalam melihat keterlibatan masyarakat dalam pariwisata dengan membuat actionplan. Actionplan yang dirumuskan oleh masyarakat dan untuk masyarakat dari kedua lokasi tersebut mempunyai perbedaan yang sangat tajam, terutama terkait dengan karakter sosial, budaya, potensi budaya, tingkat partisipasi masyarakat, sehingga dalam perumusan model CBT berbeda.

Berdasarkan adanya perbedaan diatas, maka perumusan model yang efektif untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat Tamansari dan Prawirotanan adalah sebagai berikut:

3. Model Kampung Budaya Tamansari

Berdasarkan hasil Focused Group Discussion (FGD), tanggal 24 November 2005 berhasil dirumuskan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang efektif untuk dikembangkan di KCB Tamansari. Dari usulan masyarakat di sekitar KCB Tamansari akan dikembangkan model kampung budaya. Dimana, semua stakeholder yang terlibat dalam sektor pariwisata mempunyai komitmen dalam memperkuat dan menjadikan potensi budaya dan ekonomi yang ada untuk di-manage secara lebih menarik dan entertaint, sehingga potensi yang ada dapat diterima dan dinikmati secara baik dan nyaman oleh wisatawan.

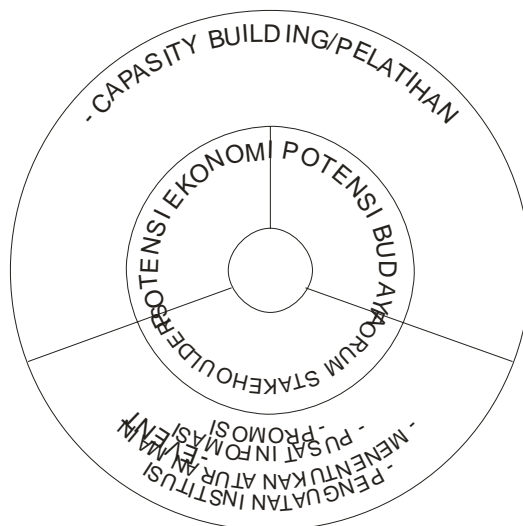
Untuk memperkuat dan menjaga potensi budaya dan ekonomi tersebut, diperlukan usaha bersama dari penggiat seni dan budaya dan ekonomi untuk mengemas produk tersebut agar kualitas dan kuantitas baik. Dengan menjaga kualitas dan kuantitas dari produk ini akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat secara ekonomi. Untuk menjaga kualitas produk tersebut, maka pemerintah dengan kewenangan yang mempunyai tanggung jawab untuk tidak saja memberikan intensif terhadap pelaku budaya (sebagaimana yang dilakukan selama ini), melainkan juga melakukan penguatan kapasitas dari pengrajin budaya melalui pelatihan baik mengenai perkembangan dan bentuk desain, model yang terbaru dan perlu diberikan kemampuan kepada penggiat budaya, institusi kemasyaratan untuk dibekali kemampuan berbahsa Inggris.

Untuk mempromosikan potensi yang ada, maka perlu dilaksanakan even-even budaya berskala besar disekitar lokasi KCB Tamansari. Sebenarnya even budaya untuk Tamansari sudah muncul inisiatif dari masyarakat untuk melakukan pameran batik secara rutin. Namun, dari hasil dari pameran tersebut belum memberikan gaung yang begitu besar dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bahkan Hadjir Digidarmodjo sebagai salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa kedepan kita tidak hanya akan mengadakan pameran batik saja, melainkan akan mengembangkan dan melatih para pemuda yang ada disekitar KCB Tamansari untuk kursus wayang kulit dan nantinya akan dipentaskan secara rutin.

Namun, potensi yang ada tersebut masih terpisah satu sama lainnya dan belum berorganisir secara institusional. Untuk itu, peran FGD beresepakat untuk membentuk forum stakeholder yang terdiri dari unsur masyarakat (LPMK, RT/RW, pemuda, pengelola KCB Tamansari), operator pariwisata (Gabungan Perhotelan Yogyakarta, ASITA, dan PAFTA Kota Yogyakarta, dan Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan unsur pengambilan keputusan (DPRD DIY dan Kota Yogyakarta), Dinas Kebudayaan DIY, BAPARDA DIY, dan dinas Pariwisata Kota Yogyakarta) dan perguruan tinggi (UMY). Forum tersebut nantinya memberikan masukan yang konstruktif bagi masyarakat untuk mengembangkan dan memperkuat institusi agar dapat berjalan dan berdaya, melakukan promosi, membentuk pusat informasi dan membuat aturan main bagi pelaku pariwisata dengan masyarakat tempatan. Misalnya, guide dan agensi hanya mendampingi wisatawan dan masyarakat saja yang boleh menjelaskan mengenai sejarah seluk-beluk mengenai Tamansari. Begitu juga dengan artshop-artshop yang menawarkan souvenir, harus beresepakat untuk menentukan standar harga yang sama, supaya tidak terjadi pasar yang tidak sempurna dan nantinya akan merugikan pengrajin.

Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat kampung budaya Tamansari secara lebih jelas dapat dilihat dalam diagram 1:

Diagram 1
Model pengembangan CBT
Kampung Budaya Tamansari



Dalam hal ini, penguatan kapasitas (capacity building) masyarakat setempat perlu dilakukan secara intensif oleh pemerintah atau dinas terkait. Penguatan potensi budaya di masyarakat sudah banyak dilakukan di Amerika, Australia dan lainnya. Sebab “semua

pariwisata adalah modal budaya” (Trimarchi dan Panuchi; 2005, 11). Mengingat di sekitar Tamansari memiliki potensi dan modal budaya (cultural capital) yang beragam seperti kerajinan batik, tari tradisional, gejog lesung, wayang kulit, pandai besi dan lain-lain, maka ada beberapa metode yang perlu dilakukan, yakni pertama, menyadarkan masyarakat bahwa seluruh kegiatan pariwisata yang ada di Tamansari adalah wisata budaya (cultural tourism) dan membangun agenda bersama (common agenda) lintas sector. Kedua, mengidentifikasi batasan-batasan kegiatan pariwisata tradisional guna menyediakan pengalaman dan interaksi budaya yang lebih beragam dan berjangkauan luas. Ketiga, melakukan desain baru atau memperbaiki yang sudah ada guna menciptakan pengalaman-pengalaman berwisata. Keempat, mengkaitkan pengembangan wisata dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kelima, menciptakan suatu produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pariwisata. Keenam, menciptakan produk-produk wisata lain berbekal modal budaya untuk memperoleh kemandirian dan kesejahteraan ekonomi sendiri.

4. Model Kampung Internasional Prawirotaman

Berdasarkan hasil Focused Group Discussion (FGD), tanggal 24 November 2005 berhasil dirumuskan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang efektif untuk dikembangkan di Prawirotaman. Dari usulan masyarakat yang tinggal di Prawirotaman, akan dikembangkan kampung internasional. Model ini dipilih mengingat secara sosial, masyarakat Prawirotaman tidak memiliki potensi atau model budaya apapun. Seperti yang telah dijelaskan dimuka, kampung Prawirotaman dahulu adalah kampung perajin batik berubah menjadi sentral hotel-hotel melati, guest house, dan penginapan murah untuk para wisatawan. Tidak ada potensi budaya yang menjadi karakter kampung Prawirotaman sebagai Tamansari misalnya.

Saat ini masyarakat Prawirotaman apatis terhadap pariwisata yang ada disekitarnya. Mereka tidak peduli atau memiliki sense of tourism yang rendah. Mereka juga tidak tertarik untuk turut mengembangkan modal budaya setempat guna mendukung wisata Prawirotaman. Tragisnya, operator atau pengelola pariwisata juga tidak menaruh kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Pengelolaan bisnis pariwisata dikampung tersebut juga masih menganut budaya “majikan”. Artinya, karyawan tidak memiliki jaminan masa depan dalam karirnya, sebab mereka dianggap hanya sebagai “buruh” yang bekerja pada pemilik hotel, guest house, dan kafe tersebut. Dalam sistem manajemen tradisional ini, tidak ada promosi karir sedikitpun. Semuanya berada dalam otoritas sang majikan (baca: pengelola).

Namun demikian, bukan berarti masyarakat setempat tidak peduli dengan “hiruk pikuk” pariwisata di daerahnya. Mereka ingin terlibat dan berpartisipasi. Tetapi persoalannya, masyarakat setempat tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pariwisata dan juga tidak memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan dan diandalkan. Perhatian pemerintah dan dinas terkait juga masih sangat minim. Hingga sekarang ini belum ada inisiatif dari pemerintah dan dinas terkait (decision maker) untuk mengajak dan melibatkan masyarakat setempat dalam mengelola dan mengembangkan kampung internasional Prawirotaman.

Oleh karena itu, masyarakat berharap pengambil kebijakan ditingkat eksekutif dan legislatif mau memperhatikan inisiatif dan potensi lokal yang ada. Pemerintah dan dinas terkait, selaku pelaksana kebijakan, diharapkan menjadi fasilitator bagi munculnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan kampung internasional tersebut. Dalam hal ini, pemerintah misalnya memfasilitasi masyarakat setempat untuk kursus bahasa asing, pelatihan manajemen pariwisata, pelatihan guide, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan pariwisata.

DPRD selaku legislatif juga dituntut untuk membuat regulasi bagi pengembangan pariwisata di Prawirotaman yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Tugas utama DPRD adalah membuat regulasi tentang pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang melibatkan inisiatif, kreatifitas dan partisipasi masyarakat lokal. Kebijakan legislatif ini

diperlukan sebagai landasan yuridis bagi partisipasi masyarakat dalam dunia pariwisata. Dengan demikian, diharapkan pengelola pariwisata yang masih menggunakan manajemen tradisional akan lebih terbuka, aspiratif, dan sinergis dengan masyarakat setempat.

Sedangkan pihak pengelola (hotel, guest house, kafe, dll) dituntut untuk membuka diri dan mensinergikan kegiatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dengan masyarakat setempat. Sinergisitas operator wisata dan masyarakat disini bisa diwujudkan dengan membentuk forum bersama. Forum ini penting diciptakan sebagai wadah diskusi, sharing ide dan gagasan antara pihak pengelola wisata dengan masyarakat setempat tentang pengembangan PRAWIROTAMAN sebagai kampung internasional. Di dalam forum bersama itu, kedua belah pihak juga dapat menentukan aturan main bersama dan mencari upaya pengembangan potensi ekonomi yang ada di masyarakat.

Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di kampung tersebut misalnya menciptakan unit-unit usaha kecil yang dikemas secara menarik dan menjadi bagian dari daya tarik kampung PRAWIROTAMAN. Pihak pengelola wisata dapat membantu permodalan dan mempromosikan unit ekonomi masyarakat tersebut. Sebaliknya, unit ekonomi masyarakat juga turut membantu mempromosikan keberadaan dan keunikan hotel, guest house, kafe dan lainnya secara terpadu. Model pariwisata berbasis masyarakat di kampung internasional PRAWIROTAMAN secara lebih jelas dapat dilihat dalam diagram 2.

Diagram 2
Model Kampung Internasional PRAWIROTAMAN



G. Simpulan dan Rekomendasi

1. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta
 - Ditingkat kebijakan, sudah ada upaya dari para stake holders untuk sedapat mungkin melibatkan masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Namun, perencanaan dan pengembangan tersebut masih bersifat praktis-teknis dengan memberikan insentif kepada pelaku budaya dan belum pada pengembangan konsep yang komprehensif untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.
 - Sementara peran serta masyarakat sendiri berdasarkan temuan untuk kasus di Tamansari sudah ada inisiatif dari beberapa orang dan belum menjadi kekuatan komunitas yang terorganisir dengan baik. Multyplayer effect dari keberadaan

Tamansari, masyarakat dan sekitarnya terdapat komunitas perajin Batik dan sanggar Tari. Namun, komunitas-komunitas yang ada di Tamansari tidak dimanajemen dengan baik, sehingga perannya sekedar sebagai penunjang kegiatan pariwisata di situs Tamansari. Sementara untuk kasus Prawirotaman, peran serta masyarakat untuk terlibat didalam pariwisata masih sangat rendah. Hubungan masyarakat setempat dengan pengelola hotel, agen wisata, guide juga sangat buruk. Para pengelola wisata itu tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pengembangan kampung internasional tersebut. Bagi para pengelola, kampung Prawirotaman adalah ladang bisnis yang independent dari keterlibatan penduduk lokal. Penduduk lokal disisi lain, adalah bagian terpisah dari industri pariwisata yang berlangsung di kampung tersebut. Akibatnya, para pengelola tidak berupaya melibatkan penduduk lokal dalam bisnis wisata mereka.

b. Model yang efektif bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta

- Untuk model Tamansari, masyarakat menginginkan model kampung budaya. Sebab masyarakat di sekitar Tamansari sudah memiliki potensi dan model budaya (cultural capital) yang beragam seperti kerajinan batik tradisional, geog lesung, wayang kulit, pandhe besi dan lain-lain, maka ada beberapa metode yang perlu dilakukan, yakni pertama, menyadarkan masyarakat bahwa seluruh kegiatan pariwisata yang ada di Tamansari adalah wisata budaya (cultural tourism) lintas sektor. Kedua, mengidentifikasi batasan-batasan kegiatan pariwisata tradisional guna menyediakan pengalaman dan interaksi budaya yang lebih beragam dan berjangkauan luas. Ketiga, melakukan desain baru untuk memperbaiki yang sudah ada guna menciptakan pengalaman-pengalaman berpariwisata. Keempat, mengaitkan pengembangan wisata dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kelima, menciptakan suatu produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pariwisata. Keenam, menciptakan produk-produk wisata lain berbekal modal budaya untuk memperoleh kemandirian dan kesejahteraan ekonomi sendiri.
- Sedangkan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang efektif untuk dikembangkan di prawirotaman adalah model kampung internasional yang memerlukan adanya dorongan yang dari pemerintah dan operator pariwisata (decision maker untuk mengajak dan melibatkan masyarakat setempat dalam mengelola dan mengembangkan kampung internasional Prawirotaman. Oleh karena itu, masyarakat berharap pengambil kebijakan di tingkat eksekutif dan legislatif mau memperhatikan inisiatif dan potensi lokal yang ada. Pemerintah dan dinas terkait, selaku pelaksana kebijakan, diharapkan menjadi fasilitator bagi munculnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan kampung internasional tersebut. Dalam hal ini, pemerintah misalnya memfasilitasi masyarakat setempat untuk kursus bahasa asing, pelatihan manajemen pariwisata, pelatihan guide, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan pariwisata.
- Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di kampung Prawirotaman tersebut misalnya menciptakan unit-unit usaha kecil yang dikemas secara menarik dan menjadi bagian dari daya tarik kampung Prawirotaman. Pihak pengelola wisata dapat membantu permodalan dan promosi unit ekonomi masyarakat tersebut. Sebaliknya, unit ekonomi masyarakat juga membantu mempromosikan keberadaan dan keunikan hotel, guest house, kafe dan lainnya secara terpadu.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian yang ditujukan kepada Pemerintah dan DPRD.

- a. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menindaklanjuti secara konkrit model yang telah diinisiasi oleh masyarakat ini dengan memfasilitasi dan mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

- b. Pemerintah Kota Yogyakarta harus menyatukan langkah dengan melakukan koordinasi intern antar dinas/instansi terkait dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat berbasis masyarakat secara komprehensif.
- c. DPRD Kota Yogyakarta perlu membuat peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat.

KESIAPAN MASYARAKAT CODE UNTUK MENINGKATKAN KECAKAPAN HIDUP DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI CINDERAMATA KHAS YOGYAKARTA

Oleh : Prapti Karomah, Marwati dan Kapti Asiatun

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki potensi, kesempatan dan peluang untuk mengembangkan program wisata, baik yang sudah di garap, yang belum di garap, yang sudah berkembang maupun yang belum berkembang. Disisi lain pengembangan daerah wisata merupakan peluang untuk mengisi kesempatan kerja maupun peluang kesempatan berusaha bagi masyarakat. Potensi wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi wisata pantai, alam, gunung, agrobisnis, sejarah, budaya seni dan wisata pendidikan yang diantaranya dapat untuk dapat menyalurkan potensi masyarakat. Selanjutnya, disadari bahwa untuk pengembangan program wisata merupakan tantangan guna memenuhi tuntutan pasar. Tantangan tersebut dapat meliputi pengembangan program pelayanan jasa dan produk, peningkatan daya tarik dan rancangan keunggulan. Hal ini semua sekaligus merupakan salah satu permasalahan saat ini. Pengembangan program wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mengoptimalkan berbagai sumber yang tersedia, termasuk masyarakat sekitar code sebagai bagian sumber daya manusia.

Code merupakan bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang letaknya ditengah kota dengan penduduk yang relatif padat, namun merupakan masyarakat yang tergolong miskin dengan kelompok usia yang bervariasi. Masyarakat yang berdomisili di sekitar code banyak yang putus sekolah karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah sampai sekolah menengah atas terlebih perguruan tinggi. Untuk membuat masyarakat code menjadi sumberdaya manusia yang berhasil guna maka perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan minatnya agar dapat digunakan sebagai alat mencari penghasilan yang pada akhirnya diharapkan dapat mengangkat taraf hidup mereka. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi potensi masyarakat sekitar Code tentang minat terhadap jenis-jenis pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikembangkan. Agar arah pembinaan nantinya sesuai dengan minat dan dapat dikembangkan secara maksimal maka diperlukan penelitian pendahuluan tentang identifikasi potensi masyarakat sasaran.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi ekonomi rata-rata warga masyarakat sekitar code?
2. Apakah warga masyarakat Code mempunyai minat untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui pelatihan ?
3. Seberapa banyak warga masyarakat Code yang berpotensi untuk meningkatkan kecakapan hidup?
4. Bagaimanakah kesiapan warga masyarakat Code untuk mengikuti pendidikan kecakapan hidup?
5. Jenis kecakapan hidup yang bagaimana yang diminati untuk dikembangkan
6. Bagaimanakah sikap warga masyarakat Code terhadap kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kecakapan hidup?
7. Seberapa jauh kepedulian warga masyarakat Code terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan?

8. Bagaimanakah persepsi warga masyarakat Code terhadap Kota Yogyakarta sebagai daerah pariwisata?

C. Pembatasan Masalah

Keberadaan masyarakat Code di Daerah Kota Yogyakarta sudah banyak dikenal orang, khususnya kondisi ekonomi penduduknya yang memang kurang mampu. Sebagai akibat perekonomian yang kurang mampu tersebut maka banyak remaja yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya sampai jenjang perguruan tinggi, sehingga banyak diantara mereka yang menjadi pengangguran karena bekal untuk hidup secara mandiri belum cukup. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat kurang mampu yang berada disekitar Code tersebut dapat hidup layak sebagaimana masyarakat yang lain, salah satu bentuk upaya adalah dengan memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat berkembang secara maksimal, jenis materi yang diberikan harus sesuai dengan minat masing-masing individu.

Sebagai salah satu pendukung program pariwisata yang perlu dikembangkan adalah tersedianya cinderamata khas Yogyakarta di setiap obyek wisata. Karena wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat sering-sering mencari oleh-oleh yang dapat digunakan sebagai cinderamata. Maka akan tepat kiranya bila pengetahuan dan keterampilan tersebut diberikan kepada warga masyarakat di sekitar Code, dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah daerah khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Karena banyaknya permasalahan yang bisa diangkat, maka dalam penelitian ini dibatasi pada kesiapan warga masyarakat Code yang tergabung dalam paguyuban yang mengikuti pelatihan pembuatan berbagai cinderamata khas Yogyakarta dengan memanfaatkan limbah industri tanpa membedakan jenis kelamin, usia 13-40 tahun dan pendidikan yang pernah ditempuh.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimanakah kesiapan masyarakat sekitar code untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan limbah industri sebagai cinderamata khas Yogyakarta
2. kelompok umur berapa dari masyarakat sekitar code yng berminat mengikuti pelatihan
3. jenis-jenis pelatihan apa saja yang diminati untuk diikuti
4. bagaiman prospek ketahanan masyarakat sekitar code untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan limbah industri sebagai cinderamata khas Yogyakarta

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui kesiapan masyarakat sekitar code mengikuti pelatihan pemanfaatan limbah industri sebagai cinderamata khas Yogyakarta
2. untuk mengetahui kelompok umur masyarakat sekitar code yang berminat mengikuti pelatihan pemanfaatan limbah industri sebagai cinderamata khas Yogyakarta
3. untuk mengikuti jenis-jenis pelatihan yang diikuti
4. untuk mengetahui prospek ketahanan mengikuti pelatihan yang akan diselenggarakan

F. Manfaat Penelitian:

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat :

1. memperoleh informasi tentang kesiapan masyarakat code untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan limbah industri sebagai cinderamata khas Yogyakarta.
2. mendapatkan informasi tentang kelompok umur masyarakat sekitar code yang berminat mengikuti pelatihan.
3. Memperoleh informasi tentang jenis-jenis pelatihan yang diminati.
4. memperoleh informasi tentang prospek ketahanan masyarakat sekitar code untuk mengikuti pelatihan yang akan diselenggarakan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibatasi sebagai adanya kebutuhan yang terpenuhi (Valentin, 1970:12). Dengan batasan seperti itu, kemiskinan menjadi relatif maknanya, karena kebutuhan bagi tiap orang tidak sama. Nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat juga menyebabkan perbedaan makna hakiki kemiskinan yang dibatasi seperti di atas. Miskin di Amerika Serikat tidak sama dengan miskin di India. Meskipun demikian ada pedoman yang mendasar tentang kemiskinan yaitu seorang yang terpapar/terekspos pada kemungkinan mati karena kebutuhan makannya tidak terpenuhi. Dengan demikian kemiskinan adalah suatu kontinum yang kadarnya dibedakan oleh kultur dari masing-masing masyarakat.

Menurut Klass de Vos (1991) miskin adalah suatu keadaan seseorang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan hidup yang paling rendah. Selanjutnya menurut Arsyad (1988: 69), bahwa kemiskinan itu meliputi aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin asset-aset pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan aspek sekunder adalah miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dengan demikian menurut Arsyad kemiskinan akan terwujud antara lain dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang tidak memenuhi standar kesehatan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relative rendah.

Secara umum, Salim (1976: 11) mengemukakan lima karakteristik kemiskinan. Kelima karakteristik tersebut adalah: (a) pada umumnya penduduk miskin tidak memiliki factor produksi sendiri (b) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri (c) tingkat pendidikan pada umumnya rendah (d) banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas apapun (e) banyak diantara mereka relatif muda dan tidak mempunyai ketrampilan atau pendidikan yang memadai.

B. Life Skill (kecakapan Hidup)

Menurut Indrajati sisi (2002), kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mampu menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Dalam pandangan Slamet PH (2002), kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Sedangkan Brolin (1989), mengemukakan bahwa kecakapan hidup merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk berfungsi dan bertindak secara mandiri dan otonom dalam kehidupan sehari-hari, tidak harus selalu meminta bantuan dan petunjuk pihak lain. Ini berarti bahwa bentuk kecakapan hidup berupa pengetahuan sebagai praksis dan kiat (praxis dan techne), bukan teori; pengetahuan sebagai *skills of doing* sekaligus *skills of being*.

Pendidikan berjalan pada setiap saat dan pada segala tempat. Setiap orang dari kanak-kanak hingga tua mengalami proses pendidikan melalui apa yang dijumpai atau apa yang dikerjakan. Walaupun tidak ada pendidikan yang sengaja diberikan, secara alamiah setiap orang akan terus belajar dari lingkungannya. Pendidikan diartikan sebagai proses perolehan pengalaman belajar yang berguna bagi peserta didik. Apabila dikaitkan dengan life skills, maka pendidikan sebagai sistem yang pada dasarnya merupakan sistematisasi dari proses perolehan pengalaman. Oleh karena itu, secara filosofis pendidikan diartikan sebagai proses pengalaman belajar yang berguna bagi peserta didik, pengalaman belajar tersebut diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga siap digunakan untuk memecahkan problema dalam kehidupan yang dihadapi. Pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat mengilhami mereka ketika menghadapi problema dalam kehidupan sesungguhnya.

Tahun 2001 pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional mengembangkan konsep pendidikan kecakapan hidup (Life Skills Education), yaitu suatu pendidikan yang dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup, yaitu keberanian menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemdsian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Pendidikan yang dapat disinergikan berbagai mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, dimanapun ia berada, bekerja atau tidak bekerja, apapun profesinya. Dengan bekal kecakapan hidup tersebut, diharapkan para lulusan akan mampu memecahkan problema kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari dan menciptakan pekerjaan bagi meraka yang tidak melanjutkan pendidikannya (Depdiknas, 2002). Kendall dan Marzano (1997) menegaskan bahwa kecakapan hidup (life skills) telah menjadi salah satu hal yang harus dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat, termasuk peserta didik, agar mereka mampu berperan aktif dalam lapangan kerja yang ada serta mampu berkembang.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Indrajati Sidi (2002) bahwa kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan untuk bekerja, dan dapat dipilih menjadi lima, yaitu: (1.) kecakapan mengenal diri (self awarness), yang juga disebut kemampuan personal (personal skill), (2.) kecakapan berpikir rasional (thinking skill), (3.) kecakapan sosial (social skill), (4.) kecakapan akademik (academic skill), dan (5.) kecakapan vokasional (vocational skill).

Tiga kecakapan yang pertama dinamakan General Life Skill (GLS), sedangkan dua kecakapan yang terakhir disebut Specific Life Skill (SLS). Dalam kehidupan nyata, antara GLS dan SLS, antara kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan akademis, kecakapan vokasional tidak berfungsi secara berpisah-pisah, atau tidak terpisah secara eksklusif. Hal yang terjadi hanya peleburan kecakapan-kecakapan tersebut, sehingga menyatu menjadi sebuah tindakan individu yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional dan intelektual. Derajat kualitas tindakan individu dalam banyak hal dipengaruhi oleh kualitas kematangan berbagai aspek pendukung tersebut diatas.

Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah mengfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya dimasa datang. Secara khusus, pendidikan berorientasi kecakapan hidup bertujuan : (1.) mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi, (2.) memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas, dan (3.) mengoptimalisasikan pemanfaatan sumberdaya yang ada dimasyarakat, dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (indrajati sidi, 2002).

Dari uraian diatas maka dapat disarikan bahwa kecakapan hidup (life skills) adalah kemampuan yang diperlukan untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat, seperti kemampuan berfikir, berkomunikasi secara efektif, membangun kerjasama, melaksanakan peran sebagai warga Negara yang bertanggung jawab dan siap terjun di dunia kerja.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat sekitar lembah Code, sedang pelaksanaan penelitian dikakukan di sanggar belajar yang berada di Yogya Studi Center Kotabaru Yogyakarta. Adapun alasan pemilihan lokasi adalah dengan pertimbangan bahwa :

- 1) Masyarakat sekitar lembah sungai code dikategorikan dalam kelompok masyarakat miskin dan belum memiliki pekerjaan tetap,
- 2) Saat ini ada paguyuban yang memudahkan pencarian data dalam penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan antara 4-5 bulan, bulan Agustus sampai Desember 2005.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yakni menghimpun fakta atau data yang dapat mengungkap keadaan yang ada dan dialami oleh subyek penelitian.

C. Populasi dan sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga di sekitar sungai code Yogyakarta yang tergolong warga miskin untuk menentukan sampel dengan tujuan dapat mewakili populasi secara representative digunakan teknik purposive random sampling, dengan criteria; sebagai anggota sebagai berikut : (1) anggota paguyuban, (2) belum mempunyai pekerjaan tetap (3) usia 13-40 tahun, berminat untuk diberi pelatihan, sanggup mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Metode Pengamatan (observasi)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi fisik dan geografis daerah penelitian yang termasuk wilayah sekitar code.

2. Metode wawancara

Dalam penelitian menggunakan wawancara bebas terpimpin yang berarti menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi daftar pertanyaan tersebut tidak mengikat jalannya wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument utama adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini kedudukan peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data dan pelapor hasil penelitian.

G. Validitas Instrumen

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan:

Triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Desa ini (1978; dalam Berg,1989; Moleong, 2000) membedakan empat macam triangulasi, yaitu dengan sumber, metode, penyidik dan teori. Adapun yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan menggunakan sumber dan metode.

Untuk mengetahui validitas instrument dalam penelitian ini digunakan pendapat ahli (expert judgment). Expert yang dipilih adalah pimpinan paguyuban, Pembina Joga Studi centre dan ketua kelompok paguyuban. Menurut Expert pedoman wawancara dikatakan valid untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah warga masyarakat disekitar code yang tergabung dalam paguyuban yang dikelola oleh studi centre yogyakarta yang berjumlah 33 orang.

Berdasarkan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu tentang usia, tingkat pendidikan, pengalaman mendasar, minat untuk mengikuti pelatihan, frekuensi tatap muka yang diinginkan untuk mengikuti pelatihan, waktu yang diminati untuk mengikuti pelatihan, ketahanan mengikuti pelatihan dan kegiatan rutin sehari-hari yang dilakukan saat ini bagi warga masyarakat di sekitar code yang tergabung dalam paguyuban adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Distribusi Tingkat Usia Warga Masyarakat Code

No	Usia	Jumlah	%
1	13-16	2	6.06
2	17-20	17	51.52
3	>20	14	42.42
	Jumlah	33	100%

Pada table diatas dapat diketahui bahwa 33 responden, yang berusia 13-16 tahun 2 orang (6.6%), 17-20 tahun 17 orang (33.33%) dan diatas 20 tahun 14 orang (51.85%)

Table 2. Distribusi Tingkat Pendidikan Warga Masyarakat Code

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	II SD	1	3.03
2	VI SD	1	3.03
3	Lulus SD	7	21.21
4	I SLTP	2	6.06
5	/sederajat	3	9.09
6	II	-	-
7	SLTP/ederajat	8	24.24
8	III	2	6.06
9	SLTP/ederajat	1	3.03
10	Lulus SLTP	-	-
11	I SLTA	8	24.24
	II SLTA		
	III SLTA		
	Lulus SLTA		
	Jumlah	33	100%

Pada tabel 2. dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan warga disekitar Code yang tergabung dalam paguyuban paling banyak lulus SLTP dan SLTA masing-masing sebanyak 8 orang (24.24 %), sampai kelas VI SD 1 orang (3.03 %), lulus SD 7orang (21.21 %), I SLTP/sederajat 6 orang (6.06 %), II SLTP/ sederajat 3 orang (9.09 %), I SLTA 2 orang (6.06 %), II SLTA 1 orang (3.03 %).

Tabel 3. Pengalaman Belajar Warga Code Dalam Pelatihan

No	Keterangan	Jumlah	%
1	Pernah	21	63.64
2	Tidak pernah	12	36.36
	Jumlah	33	100 %

Pada Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa dari 33 responden yang telah mempunyai pengalaman dalam pelatihan adalah 21 orang (63.64 %) dan yang belum pernah mengikuti pelatihan sebanyak 12 orang (36.36 %).

Tabel 4. Ketertarikan Warga Code Untuk Mengikuti Pelatihan

No	Jumlah Tatap Muka yang diinginkan	Jumlah	%
1	Tiap hari	2	6.06
2	2 hari sekali	16	48.48
3	3 hari sekali	6	18.18
4	4 hari sekali	2	6.06
5	Terserah	3	9.09
6	Tidak menjawab	4	12.12
	Jumlah	27	100 %

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa dari 33 orang responden yang menginginkan pelatihan diselenggarakan tiap hari 2 orang (6.06 %), 2 hari sekali paling banyak, yaitu 16 orang (48.48 %), dan yang lain 3 hari sekali 6 orang (18.18 %), 4 hari sekali 2 orang (6.06 %), menjawab terserah 3 orang (9.09 %) dan 4 orang responden tidak memberikan jawaban.

Tabel 5. Waktu Yang Diinginkan Warga Code Untuk Mengikuti pelatihan

No	Waktu	Jumlah	%
1	Sore hari	13	39.39
2	sesudah jam 15	9	27.27
3	Sore hari	4	12.12
4	sesudah jam 16	7	21.21
	Sore hari sesudah jam 18		
	Tidak menjawab		
	Jumlah	33	100 %

Pada Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa bila diadakan pelatihan, waktu yang diinginkan oleh 33 responden adalah sore hari sesudah jam 15.00 sebanyak 13 orang (39.39 %), sore hari sesudah jam 16.00 sebanyak 9 orang (27.27 %) dan sore hari sesudah jam 18.00 sebanyak 4 orang (12.12 %).

Tabel 6. Kegiatan Rutin Yang dilakukan warga Code Sehari-hari saat Ini

Waktu	Kegiatan/acara yang dilakukan
08.00-10.00	Kepasar, memasak, mengurus anak, cuci, berbenah
10.00-12.00	Cuci pakaian, mengantar ke sekolah dan menjemput, memasak, ambil cucian
12.00-14.00	Tidur siang, makan, istirahat, beribadah
14.00-16.00	Mengurus anak, santai, istirahat, setrika, tidur, mandi, jual rokok
16.00-18.00	Mandi, membimbing anak belajar, nyam tanaman, membersihkan rumah, menyiapkan makan malam, pulang jualan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kegiatan sehari-hari mereka mengerjakan kegiatan rutin seperti ke pasar, mencuci, memasak, mengantar dan menjemput anak sekolah, setrika, dan lain-lain. Ada 1 orang berjualan rokok dan usaha makanan.

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan tertarik dan bersedia hal ini dimungkinkan karena mereka masih punya waktu luang dan belum punya penghasilan tetap yang betul-betul dapat diandalkan sebagai sumber kehidupan mereka. Kesibukan mereka dalam keseharian masih terbatas pada kesibukan rutin yang tidak memberikan penghasilan. Padatnya penduduk di sekitar Code dengan usia yang sebagian besar masih cukup potensial sebagai asset sumber daya manusia yang dimungkinkan dapat mendukung Yogyakarta sebagai daerah pariwisata. Yogyakarta sebagai daerah pariwisata merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk mengembangkan program wisata maka kondisi sekitar Code yang seperti itu bila ditangani secara sungguh-sungguh diharapkan dapat meningkatkan asset Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pula bahwa waktu pelatihan yang dipilih mereka sangat bervariasi, namun sebagian besar antara jam 15 sampai dengan jam 18, hal ini mungkin karena kegiatan mereka berbeda-beda.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. hampir semua responden masyarakat tertarik dan siap (90.91%) bila akan diselenggarakan pelatihan dengan memanfaatkan limbah industri sebagai cinderamata,
2. kelompok umur warga masyarakat code yang berminat untuk mengikuti pelatihan relative masih potensial karena berusia di bawah 40 tahun,
3. jenis pelatihan yang diminati berdasarkan contoh yang diberikan mereka tidak menentukan karena bagi mereka merupakan barang baru,
4. prospek ketahanan mengikuti latihan bagus, dimana dari 33 responden sebanyak 30 orang (90.91%) menyatakan bersedia berlatih tidak hanya di tempat pelatihan, tetapi juga di rumah.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. karena ternyata sebagian besar responden menyatakan tertarik dan bersedia mengikuti pelatihan maka program pelatihan hendaknya segera direalisasikan,
2. program pelatihan hendaknya diberikan secara tuntas dan dapat dievaluasi sehingga betul-betul dapat memberikan kecakapan hidup yang bermanfaat,
3. program pelatihan hendaknya diikuti dengan tindak lanjut sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai sumber untuk meningkatkan penghasilan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang sartono, 2003. Pengenalan Pelatihan Kewirausahaan dalam Rangka Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup, Semiloka pengembangan model pembelajaran, Lembaga Penelitian UNY, 13 Agustus 2003.
- Brolin, D.E. 1989. Life centered career Education: A competency Based Approach. Reston VA: the Council for Exeptional Children
- _____. 2002. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan kecakapan Hidup. Buku I, II, dan III. Jakarta: Depdiknas.

- _____. 2003. Panduan Pembelajaran Berorientasi Pada Kecakapan Hidup. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Proyek Pengembangan Pendidikan Berorientasi Ketrampilan Hidup. Jakarta: Depdiknas.
- _____. 2004. Pedoman Penyelenggaraan Kecakapan Hidup (Life Skills) Pendidikan Non Formal. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Jakarta: Depdiknas.
- Dinas Pendidikan Jawa Barat. 2002. Pendidikan Berbasis Luas Kecakapan Hidup dengan Model Pelaksanaan Pembelajaran Hidup di Sekolah. Bandung: CV Dwi Rama.
- Indrajati Sidi. 2002. Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) melalui Pendidikan Berbasis Luas (Broad-Based Education-BBE), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Kendall, John S dan Marzano, Robert J. 1997. Content Knowledge: A Compedium of Standards and Benchmarke for K-12 Education Aurora, Colorado. USA:

RELEVANSI MATERI PEMBELAJARAN BAHASA ASING DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DENGAN PELESTARIAN BUDAYA DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA.

Oleh : Dra. Hermayati, S.Pd,M.Pd.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kota Yogyakarta dikenal sebagai 'Kota Budaya' dan 'Kota Pariwisata'. Hal ini merupakan salah satu asset daerah yang dapat 'dijual' terutama pad turis mancanegara untuk meningkatkan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu alternative untuk mewujudkannya adalah dengan meningkatkan kualitas SDM, termasuk penguasaan bahasa inggris terapan (English use). Masalahnya, penguasaan bahasa Inggris SDM Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Negara-negar ASEAN lain (Madya, 2003: 1; Gunawan, 2004: 11-12; Ismail, 2002:1).

Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata ke-tiga setelah Bali dan Jakarta perlu SDM berkualitas untuk meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Pemerintah kota dan seluruh elemen masyarakat termasuk para guru bahasa Inggris, pantas berusaha keras demi terwujudnya cita-cita tersebut. Idealnya, pembelajaran bahasa Inggris mengacu pada kebutuhan daerah sebagai users (Richards, 2001;7).

Permasalahannya adalah, hingga saat ini masih banyak sekolahan yang belum mempertimbangkan hal tersebut akibat kurangnya kesadaran dan minimnya informasi yang diperoleh stakeholders menyangkut pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya melalui proses pembelajaran bahasa Inggris.

Peningkatan mutu pembelajaran bahasa Inggris dengan mensinergikan kebutuhan daerah (needs analysis) kedalam materi pembelajaran, bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan daerah dan menghadapi persaingan global serta sebagai landasan dalam menjawab tantangan di era kerjasama perekonomian seluruh kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Corporation) pada tahun 2020 mendatang.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diidentifikasi permasalahan penelitian ini, yakni: (1) rendahnya kualitas penguasaan bahasa Inggris perlu penganan serius oleh pemerintah daerah, (2) pembelajaran bahasa Inggris di sekolah belum mengacu pada pengembangan materi yang mendukung pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata sebagai sumber andalan pendapatan daerah, (3) kekurangadaran stakeholders pendidikan dalam mensinergikan silabus dengan kepentingan daerah. Hal ini dapat dilihat akhir standardized tests seperti: UUB, UNAS, dan penggunaan materi TOEFL sebagai alat ukur kemampuan dan bukan pada proses pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) dengan system penilaian berbasis kelas (classroom-based assessment) sebagaimana digariskan dalam Kurikulum 2004 (Depdiknas, 2003: 17).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar kota Yogyakarta memiliki SDM berkualitas untuk menghadapi APEC tahun 2020, system pendidikan termasuk bahasa Inggris, harus dibenahi. Pemerintah daerah layak mendukung usaha inovasi yang terutama diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran yang relevan dengan analisis kebutuhan daerah.

Berdasarkan prioritas penyelesaian permasalahan yang ada, penelitian ini difokuskan pada materi pembelajaran bahasa Inggris di SMA 7, 8, 11, BOPKRI 1, dan Stella duce 1,

yogyakarta. Permasalahan yang dikaji adalah: Apakah materi pembelajaran bahasa Inggris di SMA relevan dengan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta? Berikut adalah perumusan permasalahannya:

1. bagaimanakah materi pembelajaran bahasa Inggris dan evaluasinya di SMA 9 yang sinergis dengan dimensi-dimensi: kurikulum yang berlaku, tujuan pembelajaran, model silabus, jenis dan fungsi materi, peran guru dan siswa, dan relevansinya dengan kebutuhan daerah)?
2. sejauhmana usaha guru bahasa Inggris SMA dalam mengembangkan materi pembelajarannya?
3. bagaimanakah kesepakatan para guru dalam merelevansikan materi pembelajaran dan evaluasinya dengan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang: (1) materi pembelajaran bahasa Inggris dan evaluasinya di SMA, (2) usaha para guru dalam mengembangkan materi pembelajarannya, (3) kesepakatan para guru dalam merelevansikan materi pembelajaran dan evaluasinya dengan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan bahasa Inggris sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan analisis kebutuhan lulusan dan kebutuhan users khususnya di Kota Yogyakarta.

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Materi pembelajaran bahasa Inggris (English Learning Materials)

Materi pembelajaran merupakan sarana untuk mengembangkan language skills di dalam proses belajar mengajar (PBM). Dalam hal ini Richards (2001: bab VIII, 1) menegaskan bahwa materi pembelajaran merupakan komponen inti dalam program bahasa, baik yang berupa buku teks, buku paket, maupun materi buatan guru. Ada tiga jenis bahan materi pembelajaran, yaitu: (a) berupa bahan cetak (printed materials) contohnya buku teks, buku kerja/latihan, dan lembar kerja atau kumpulan bacaan, (b) materi yang bukan cetakan (non-print materials) seperti kaset (audio materials), video atau materi ajar berbasis computer, dan (c) materi ajar yang terdiri dari sumber-sumber, baik cetakan maupun non cetakan misalnya bahan-bahan yang diakses sendiri oleh guru ataupun siswa, dan sumber dari internet.

Materi ajar merupakan salah satu dimensi dari system pembelajaran. System pembelajaran meliputi enam dimensi, yaitu: (1) kurikulum yang berlaku, (2) tujuan, (3) model silabus, (4) jenis dan fungsi materi ajar, (5) peranan guru dan siswa dalam KBM, dan (6) relevansi materi pembelajarannya dan evaluasinya dengan kebutuhan daerah. Berikut ini adalah uraian masing-masing dimensi.

Kurikulum yang berlaku pada saat penelitian ini dilakukan adalah kurikulum 2004 (KBK). Tujuan pembelajaran adalah hasil yang diharapkan dicapai pada akhir masa pembelajarannya. Tyler (dalam Richard, 2001: Bab II, 21) menegaskan bahwa tujuan pendidikan bahasa harus menggambarkan perilaku siswa (bukan perilaku guru) dan mengidentifikasi berbagai perubahan yang terjadi pada siswa hasil pembelajarannya.

Model silabus adalah kerangka silabus yang digunakan guru. Menurut Richards (2001: bab V, 11-26) ada 9 jenis silabus dalam pembelajaran bahasa: (a) grammatical/structural syllabus, (b) lexical syllabus, (c) functional syllabus, (d) situational syllabus, (e) topical/content based syllabus, (f) competency-based syllabus, (g) skills syllabus, (h) text-based syllabus, dan (i) an integrated syllabus. Kegiatan belajar mengajar adalah interaksi antar individu yang terlibat dalam aktifitas belajar. Dalam kegiatan berinteraksi diperlukan sarana berupa materi ajar untuk ditelaah. Untuk menelaah materi

ajar guru dan siswa memiliki peranan masing-masing sesuai dengan metode dan pendekatan yang dipakai. Pemilihan materi ajar harus mengacu dan selaras pada dimensi-dimensi tersebut.

2. Budaya dan Pelestariannya (Culture and its Development)

Gunarwan (2004: 6) menyimpulkan pendapat para pakar, bahwa budaya berkaitan dengan cara hidup (ways of living). Karena cara hidup itu membawahkan cara berkomunikasi (Ways of communicating), dapat dikatakan bahwa budaya juga menentukan bagaimana para anggota masyarakat budaya itu berkomunikasi menggunakan bahasa komunitasnya. Dalam hal ini Linton (1936: 82-84) mengatakan: "it is an instrument of communication that language has played its most important role in the building-up of human social heredity". Lebih jauh dia menjelaskan: "cultures can attain their wealth of content because they are carried by groups of individuals, i.e., societies".

Ada dua kategori pengertian budaya: (a) dalam arti sempit, yaitu merupakan pikiran / karya dan hasil karya manusia yang memenuhi hasrat akan keindahan, dan (b) dalam arti universal, yaitu semua kegiatan manusia minus naluri atau seluruh total pikiran manusia/ hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya yang oleh karena itu hanya bisa dicetuskan melalui proses belajar. Selanjutnya Koentjaraningrat menyimpulkan: (a) wujud budaya adalah ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan-peraturan, (b) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia/masyarakat, dan (c) wujud hasil karya manusia. Sistem budaya meliputi: religi/keagamaan, orang/kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian hidup, serta teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 2002: 1-5).

Berdasarkan konsep budaya diatas, dapat disimpulkan bahwa kelestarian budaya suatu komunitas sangat tergantung pada usaha individu komunitas tersebut dalam membawakan atau mengembangkannya. Budaya dapat ditularkan melalui komunikasi antara bahasa satu dengan bahasa yang lain oleh orang/masyarakat penggunanya. Budaya juga dapat dilestarikan melalui pembelajaran bahasa karena bahasa merupakan satu kesatuan system dalam budaya. Berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelestarian budaya masyarakat Jawa tergantung pada usaha individu komunitas (termasuk sekolah) yang ada didalamnya.

3. Pariwisata dan pengembangannya (tourism and its Development)

Hornby (1995: 1264) memakai kata 'pariwisata' ('tourism') sebagai berikut: the business of providing accommodation and services for people visiting a place: Tourism in the country's major industry. Makna diatas menyiratkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki otonomi dalam pengelolaan dalam sector pariwisata.

Ada dua kategori pariwisata, yaitu domestik dan mancanegara. Untuk melayani turis asing inilah, dibutuhkan SDM yang mampu berbahasa Inggris. Agar mereka merasa nyaman sehingga akan tinggal di Yogyakarta lebih lama (prolonging length of stay). Hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah.

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Pertama, penelitian berjudul: "Menyongsong Sistem Perdagangan Bebas Tahun 2020: Tantangan dan Peluang RI". Penelitian ini adalah hasil kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Departemen dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembantu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PEP-LIPI) di Jakarta pada tahun 1996. Laporan penelitian ini mengemukakan bahwa Indonesia di era APEC tahun 2020 berpeluang besar untuk mencapai efisiensi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang sekaligus merupakan 'tantangan' bagi perekonomian nasional. Dikatakan demikian, karena kondisi perekonomian saat ini masih belum kuat untuk menghadapi berbagai persaingan dan ketergantungan internasional (BPPM-Departemen dan PEP-LIPI, 1996).

Salah satu indikator kelemahan fundamental dalam perekonomian nasional yang paling relevan dengan kajian penelitian ini adalah permasalahan tentang kualitas SDM Indonesia yang masih rendah (Madya, 2003: 1; gunarwan, 2004: 11-12; ismail, 2002: 1) termasuk penguasaan ketrampilan berbahasa Inggris yang sangat urgen untuk menjawab 'tantangan' tersebut.

Kedua, hasil penelitian berjudul 'Laporan Penelitian tentang Kepariwisata dan Organisasi Badan Pengelola Objek Wisata di DIY', yang diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Penyuluhan dan Perencanaan Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Propinsi DIY tahun 1985. hasil penelitian ini melaporkan bahwa pariwisata merupakan harapan bagi pertumbuhan perekonomian DIY di masa mendatang. Sumber daya alam DIY yang sangat terbatas, lebih menjadikan sub sektor ini sebagai sub sektor yang sangat strategis. Peranan DIY sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan yang dijiwai oleh semangat patriotisme yang tinggi, akan lebih mantap, dengan pemantapan DIY sebagai daerah Wisata Budaya. Sebaliknya, daerah Wisata Budaya akan terus dikembangkan dengan dukungan potensi budaya dan pendidikan melalui SDM berkualitas, serta ditunjang dengan keindahan alamnya (Dinas Pariwisata Propinsi DIY, 1985).

Tinjauan pustaka ketiga, adalah hasil penelitian berkaitan dengan eksistensi serta manfaat bahasa. Menurut Djawani (1985), bahasa berfungsi sebagai: (1) alat komunikasi, (2) alat pembangunan realita, (3) pembawa kewibawaan, dan (4) alat penunjuk eksistensi seseorang. Secara umum eksistensi bahasa dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahasa digunakan manusia untuk berkomunikasi. Cassirer (dalam Djawani, 1985) menegaskan bahwa bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan keinginan seseorang. Kemampuan berbahasa seseorang dapat menambah wibawa penuturnya. Ada suatu fenomea yang menunjukkan bahwa seseorang cenderung segan dan menghormati orang yang mampu berbahasa Inggris secara aktif. Orang tersebut akan mendapat 'nilai plus' di lingkungan sekitarnya. Selain itu, kemampuan berbahasa seseorang juga sering dikaitkan dengan kedudukan atau status sosialnya di masyarakat. Ada suatu pepatah berbunyi: 'Bahasa menunjukkan bangsa'. Hal ini dapat diartikan, bahwa tingkat kemampuan berbahasa (asing) seseorang menunjukkan kualitas orang yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA 7, 8, 11, BOPKRI 1, dan SMA STECE 1 Yogyakarta. Adapun waktu penelitiannya adalah pada bulan September hingga akhir November 2005.

B. Populasi dan Sample

Penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi dan sample, namun objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah materi ajar bahasa Inggris, sedangkan sejumlah dua belas orang guru bahasa Inggris adalah narasumber (key informants)-nya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan multiple-sites case study (studi kasus multi-situs). Berdasarkan batasan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa studi kasus memiliki empat ciri utama, yaitu: (1) sasaran studinya berupa manusia, peristiwa, latar, system, peran, atau dokumen, (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar dan konteksnya dan bertujuan untuk memahami berbagai kaitan yang ada diantara variable-variabelnya, (3) kajiannya menyangkut masa lalu dan keadaan sekarang dari sasaran penelitian, dan (4) datanya didapat dari semua sumber yang dapat digali (Bogdan dan Biklen, 1992: 58; Cohen dan Manion dalam Arid an Sunyoto, 1997: 4; Yin, 1987: 23). Kelima SMA dalam penelitian ini adalah multi-situs kajian.

D. Variabel dan Instrumen Penelitian

Variabel penelitian ini adalah: (1) materi pembelajaran bahasa Inggris (yang sinergis dengan: kurikulum yang berlaku, tujuan pembelajaran, model silabus, jenis dan fungsi materi dalam kegiatan pembelajaran, peranan guru, dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan relevansi materi pembelajaran dan evaluasinya dengan kebutuhan Kota Yogyakarta), (2) usaha guru dalam mengembangkan materi, (3) kesepakatan guru untuk merelevansikan materi ajar dan evaluasinya dengan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta.

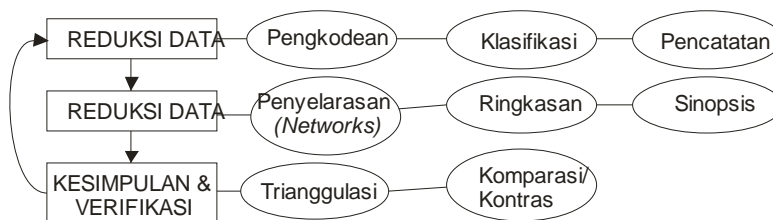
Instrumen penelitian ini adalah: (1) peneliti, berfungsi sebagai alat pengumpul data, (2) observasi, yang dilakukan langsung terhadap materi yang digunakan oleh masing-masing guru bahasa Inggris pada masing-masing sekolah, (3) dokumentasi berupa kurikulum dan silabusnya, scenario pembelajaran, dan buku teks yang dipakai, dan (4) wawancara mendalam (in-depth interview), antara peneliti dan nara sumber.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan: (1) mengumpulkan hasil pengamatan, (2) mengumpulkan dokumen berupa silabus, scenario pembelajaran (RP/SP), daftar tugas, dan buku teks yang digunakan, dan (3) mengumpulkan hasil wawancara mendalam dengan para guru untuk mendapatkan kejelasan mengenai jenis dan fungsi materi pembelajaran yang digunakan di SMA.

F. Uji Keabsahan data (Establishing Trustworthiness)

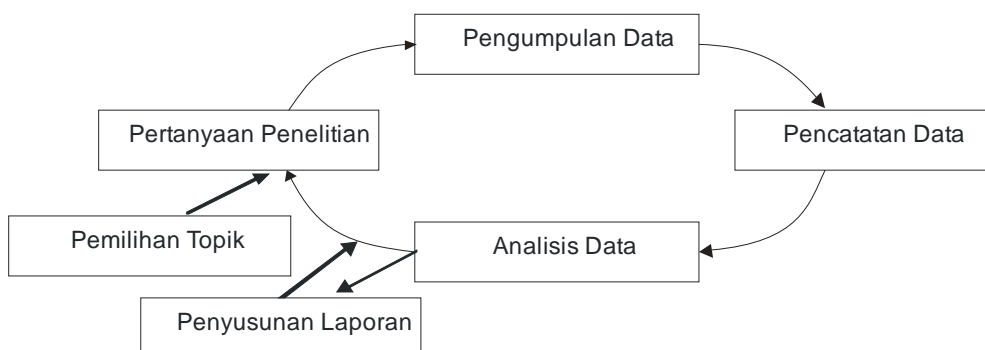
Demi keakuratan hasil penelitian, penulis melakukan uji keabsahan melalui kegiatan triangulasi (metode, sumber, peneliti dan teori) data. Sebagai gambaran berikut disajikan gambaran prosesnya menurut McDonough & McDonough (1997: 118).



Gambar 1. Proses Uji Keabsahan Data (McDonough & McDonough, 1997: 118).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Spradley (1980), sebagaimana digambarkan di bawah ini.



Gambar 2. Analisis Data Model Spradely (1980)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Materi Ajar Bahasa Inggris di SMA Kota Yogyakarta
Ada enam dimensi temuan penelitian: (1) kurikulum yang berlaku, (2) tujuan pembelajaran, (3) model silabus, (4) jenis dan fungsi materi pembelajaran dalam kegiatan belajar dan mengajar, (5) peran guru dan siswa dalam KBM (Kegiatan Belajar dan Mengajar), dan (6) relevansi materi pembelajaran dan evaluasinya dengan kebutuhan daerah (Richards, 2001: 247) berikut adalah penjelasan masing-masing dimensi.
 - a. Kurikulum yang berlaku
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua sekolah telah berupaya melaksanakan Kurikulum 2004 (KBK). Namun demikian kurang dari separuh jumlah narasumber yang benar-benar paham dalam menerapkannya. Terutama guru kelas XII merasa bahwa melaksanakan KBK adalah dilemma, sehubungan masih dilaksanakannya UNAS dan UUB.
 - b. Tujuan pembelajaran
Menurut para guru, tujuan pembelajaran bahasa Inggris secara umum adalah agar para siswa mau dan mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi yang alami, yaitu komunikasi yang nyata, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks KBM, kemauan dan kemampuan tersebut tercermin dari keberanian mereka mengemukakan pendapat dalam bahasa Inggris, secara lisan (spoken) dan tertulis (written).
 - c. Model silabus
Secara kompak semua guru menggunakan model silabus yang sama, yaitu Competency-based syllabus sesuai dengan model yang dianjurkan oleh penyusun kurikulum. Isi silabus meliputi Identitas Sekolah (ditempatkan sebagai 'heading'), standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Materi Pokok dan Uraian, Pengalaman Belajar, Indikator Pencapaian, Sistem Penilaian (meliputi Jenis Tagihan, Bentuk Instrumen, dan Contoh Instrumen), Alokasi Waktu, dan Sumber/Bahan/Alat yang dikemas dalam bentuk kolom.
Kebanyakan guru memanfaatkan silabus buatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Kota Yogyakarta, meskipun ada sementara guru (4 dari 12 orang) yang secara kreatif menyusun silabus sendiri dengan alasan bahwa gurulah penyusun silabus yang paling tepat. Menyangkut pemanfaatan silabus, ada hal yang sangat memprihatinkan yaitu ada guru yang memiliki silabus MGMP namun belum pernah dibuka pada saat dilakukan penelitian ini. Jadi guru hanya menggantungkan proses pembelajaran sepenuhnya pada buku ajar.
 - d. Jenis dan fungsi materi ajar dalam KBM
Hampir semua guru memanfaatkan jenis bahan ajar cetak yang sama, yaitu 'Look Ahead', 'Headlight', 'Linked to the World', dan 'Graded Oral Comprehension Exercise : Question and Answer'. Hanya ada satu guru disetiap sekolah yang sering memanfaatkan materi non-cetak yang berupa materi yang direkam dalam kaset (recorded materials) dan materi yang diakses sendiri oleh guru ataupun siswa dari media massa dan internet. Frekuensi pemanfaatannya pun masih jarang. Hal ini dapat dipahami, dengan mengingat bahwa pemanfaatannya sumber tersebut sebagai bahan ajar memerlukan kreatifitas, pengalaman, kemauan, serta penguasaan bahasa yang tinggi dari guru yang bersangkutan.
 - e. Peran guru dan siswa
Berdasarkan dokumen buku teks yang dipakai oleh hampir semua guru serta hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa sebagian besar guru masih berfrekuensi besar menjadi subjek, bukan sekedar sebagai fasilitator yang memperlakukan siswa sebagai subjek belajar. Hal ini berarti bahwa proses belajar masih berpusat pada guru (teacher's centered) dan bukan pada siswa (learner's centered) sebagaimana digariskan dalam KBK. Melalui wawancara yang santai diperoleh informasi bahwa guru ternyata

masih belum memahami konsep pembelajaran dengan KBK terutama menyangkut istilah-istilah yang tercantum dalam standar kompetensi seperti : spoof, recount, anekdot, analisis, CBE (Classroom-Based Evaluation), dan portofolio.

2. Usaha Guru dalam Mengembangkan Materi Pembelajarannya

Dari sejumlah data (berupa dokumen seperti materi ajar, silabus, rencana pembelajaran, dan wawancara) yang diperoleh di lokasi penelitian ternyata, dari 12 narasumber yang berhasil diwawancarai, hanya ada tiga guru yang secara tidak disadari telah berperan serta melestarikan budaya dan mengembangkan pariwisata melalui materi ajar, dua diantaranya sudah memfokus ke arah pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata DIY dan Joglosemar. Guru tersebut menggunakan sumber otentik berupa buku 'Indonesia Travel Planner' yang didapat dari Kementrian Budaya dan Pariwisata (The Minister for Culture and Touroism of The Republic of Indonesia) yang di dalamnya ada bagian yang merujuk Yogyakarta dan situs 'Joglosemar'. Ada juga guru yang mengembangkan budaya global melalui buku drama berjudul "Lorna and John (A play about relationship between the sexes to read, discuss and develop)" buah David Wolker (1982) yang diajarkan dengan metode role-playing.

3. Strategi/Langkah-langkah Guru dalam Merelevansikan Materi Pembelajaran dan Evaluasinya dengan Kebutuhan Kota Yogyakarta

Hasil wawancara dan dokumen yang ada menunjukkan bahwa ada lima guru yang cukup kreatif dengan meminta siswa mencari materi mereka sendiri untuk kemudian didiskusikan atau dilaporkan dalam bentuk karya tulis pendek untuk mengembangkan ketrampilan membaca, menulis, dan berbicara. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran CTL (Contextualized Teaching and Learning) sebagaimana dituntut oleh KBK, dan identik dengan konsep pembelajaran TBLT atau Task-Based Language teaching (Richards and Rodgers, 2001: 223-241). Tujuh orang narasumber lainnya, tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen yang diminta secara lengkap. Mereka bisa menunjukan materi ajar yang berupa buku teks, tetapi tidak dapat menunjukkan silabus dan scenario pembelajaran. Ada yang dapat menunjukan silabus, tetapi belum tahu isinya.

B. Pembahasan Temuan dari Perspektif Teoritis

1. Materi Pembelajaran Bahasa Inggris SMA Kota Yogyakarta

Pembahasan hasil penelitian ini terdiri dari enam dimensi yang saling berkaitan yaitu (a) kurikulum yang berlaku, (b) tujuan pembelajaran, (c) model silabus, (d) jenis dan fungsi materi dalam KBM, (e) peranan guru dan siswa dalam KBM, dan (f) relevansi materi dan system evaluasinya dengan kebutuhan Kota Yogyakarta.

a. kurikulum yang berlaku

Menurut 12 orang guru di lima lokasi penelitian, sebagian besar mengaku telah berusaha menerapkan kurikulum 2004, meskipun pada kenyataannya hanya lima orang yang benar-benar paham mengenai system pembelajaran menggunakan KBK. Konsep kurikulum ini sebenarnya diilhami dari hasil penelitian John Dewey pada tahun 1916 (Depdiknas, 2003: 17) tentang konstektual (Contextual Teaching and Learning /CTL), yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik apabila apa yang dipelajari terkait dengan peristiwa yang terdasi di sekelilingnya. Kegiatan dan strategi yang ditampilkan dapat berupa kombinasi dari kegiatan pembelajaran: otentik (authentic instruction), berbasis inkuiri (unquiry-based learning), berbasis masalah (problembased learning), layanan (service learning), dan berbasis kerja (work-based) learning).

Prinsip dasar CTL yang juga dipakai dalam KBK adalah: menekan pemecahan masalah, mengenal kegiatan mengajar dilingkungan seperti rumah, masyarakat dan tempat kerja, mengajar siswa untuk memantau dan mengarahkan belajarnya sehingga menjadi pembelajaran yang aktif terkendali, menekankan pembelajaran dalam konteks

kehidupan siswa, mendorong siswa belajar dari satu dengan lainnya dan belajar bersama dan menggunakan penilaian otentik (Depdiknas, 2003: 17, Richards & Rodregs, 2001: 141-148).

Berdasarkan data yang dikumpulkan baik berupa hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan para guru, diperoleh informasi bahwa dari lima orang guru yang berkategori aktif dan kreatif, hanya dua orang yang benar-benar mengimplementasikan KBK secara murni konsekuen. Artinya strategi pembelajaran yang mereka lakukan secara teoritis dan praktis telah sesuai dengan konsep KBK, yaitu: bertolak dari kompetensi, menempatkan siswa sebagai subjek, mendudukan kompetensi sebagai acuan, dan memberikan perhatian pada hasil dan proses (Depdiknas, 2003: 6)

b. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di SMA, menurut para guru adalah untuk mengembangkan kecakapan hidup (life skills) yang dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah pengembangan empat keterampilan berbahasa, yaitu membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Fokus pembelajaran bukan lagi pada pembahasan materi secara tematik, sebagaimana pada kurikulum 1994, namun pada kecakapan berbahasa siswa (language use). Tujuan KBK yang tercantum dalam pengembangan silabus (Depdiknas, 2003: 8) ada lima hal: pertama, siswa mencapai kompetensi tertentu, kedua, bahan ajar memanfaatkan sumberdaya didalam dan diluar sekolah. Ketiga, tujuan berdasar pada kompetensi yang ingin dicapai. Keempat, memberikan bekal akademik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Kelima, mampu memecahkan masalah secara wajar dan menjalani hidup secara bermartabat. Jika dikontrasikan, tujuan pembelajaran menurut para guru telah cukup sesuai dengan aspek tujuan yang digariskan dalam KBK, meskipun belum optimal.

c. Model Silabus

Model silabus yang digunakan oleh para guru secara keseluruhan telah sesuai dengan konsep yang ditawarkan, yaitu silabus berbasis kompetensi yang memuat Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Materi Pokok, Pengalaman Belajar, Alokasi Waktu, dan Sumber Bahan/ Alat (Depdiknas, 2003: 12) yang diwujudkan dalam format berbentuk kolom memanjang (lihat contoh pada Lampiran 1). Model silabus berbasis kompetensi (competency-based syllabus) mengharapkan pembelajaran menguasai kompetensi yang berkaitan dengan situasi dan kegiatan khusus/ tertentu. Kompetensi dalam hal ini adalah gambaran keterampilan-keterampilan penting, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menampilkan aktivitas dan tugas tertentu yang dituntut guru (Richards, 2001: Bab VI, 19).

d. Jenis dan Fungsi materi dalam KBM

Dalam hal penyediaan materi ternyata sebagian besar guru memanfaatkan printed materials yang berupa buku teks sebagai sumber acuan utama. Sebaliknya hanya ada sebagian kecil guru yang memanfaatkan buku teks sebagai salahsatu bahan referensi untuk latihan siswa apabila guru berhalangan mengajar. Kelompok guru ini cenderung menggunakan created materials dan authentic material. Baik penggunaan buku teks maupun materi otentik atau materi buatan guru sebagai bahan mengajar, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan dari buku teks adalah menyediakan struktur dan silabus untuk perencanaan, memberikan pembelajaran berstandar, menjaga kualitas, menyediakan berbagai sumber belajar, efisien digunakan, menjamin keefektifan model bahasa dan inputnya, dapat melatih guru, dan memiliki daya tarik dari pemakainya. Sedangkan kekurangannya adalah: bahasanya tidak otentik, memutar-balikan isi (distort content) untuk menyadari kontroversi agar bertema, tidak merefleksikan kebutuhan siswa, mengurangi peranan keterampilan guru, dan mahal.

Lebih lanjut Richards (2001: 3-4) menjelaskan bahwa kelebihan materi otentik adalah; memotivasi siswa, menyediakan informasi, cultural otentik tentang budaya sasaran (the target culture), mengekspose bahasa ilmiah, lebih mendekati/mengakses

kebutuhan siswa, dan mendorong guru untuk lebih kreatif dalam menggunakan pendekatan mengajarnya. Namun demikian, ada pula kelemahan materi otentik dibandingkan dengan materi buatan guru: materi buatan guru tidak kalah menariknya dengan materi yang lain, materi otentik sering menampilkan bahasa yang sulit dan kompleks, materi buatan sering jauh lebih baik dibanding dengan materi otentik (karena dibuat berdasarkan silabus secara bertingkat), dan materi otentik sering kali membebani guru (karena guru serta merta harus siap menyediakan waktu dan menyusun aktivitas serta latihan sebagai kelengkapannya).

e. Peranan guru dan siswa dalam KBM

Pada aktivitas belajar, peranan guru dan siswa telah secara jelas ditegaskan dalam KBK, yaitu : siswa sebagai subyek belajar dan guru adalah fasilitatornya (Depdiknas, 2003: 9). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dapat ditegaskan bahwa peranan siswa di dalam KBM tergantung pada peran dan sikap guru dalam mengelolanya. Nampaknya, karena kebanyakan guru menggunakan buku teks secara terus menerus maka peran siswa sebagai subyek belajar menjadi kurang optimal. Artinya karena semua materi telah tersedia dalam buku teks, maka dapat dipastikan usaha siswa dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya (sekolah, masyarakat, dan lingkungan tempat tinggalnya) tidak berjalan sesuai dengan tuntutan pembelajaran menggunakan sisten KBK yang menekankan pada CTL. Mestinya buku teks hanya menjadi salah satu acuan atau sumber dan bukan sebagai satu-satunya referensi dalam proses pembelajaran, karena meskipun materi yang ada didalamnya diambil dari sumber-sumber otentik, namun jelas sudah tidak actual(tidak hangat lagi atau sudah basi).

Dari hasil pengamatan terhadap sejumlah 12 guru yang tersebar pada lima sekolah, hanya ada tiga orang guru yang benar-benar memberdayakan siswa secara optimal dalam hal penyediaan materi pembelajaran, yaitu Guru Ch, Guru W, Guru N. mereka hanya memperlakukan buku teks sebagai salah satu sumber belajar dan lebih mengutamakan pada permasalahan otentik yang muncul disekitar pada saat proses pembelajaran terjadi. Menurut para Guru tersebut, materi belajar para siswa disediakan sendiri oleh mereka dengan berburu informasi actual dari media massa baik yang dicetak maupun elektronik dengan arahan guru. Materi tersebut kemudian didiskusikan di kelas.

f. Relevansi materi dan evaluasi dengan kebutuhan Kota

Pada bagian laporan penelitian ini, yang dimaksud dengan materi adalah materi pembelajaran bahasa inggris yang sesuai dengan the regional needs atau kebutuhan Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan usaha pelestarian budaya dan pengembangan pariwisatanya. Sebagaimana telah dikemukakan dimuka, dari sejumlah 12 narasumbear di lima lokasi penelitian ditemukan tiga orang guru aktif dan kreatif yang telah berusaha secara optimal untuk menerapkan KBK sesuai dengan ketentuan. Namun dari ketiga guru tersebar di tiga lokasi tersebut ternyata hanya ada satu orang (yaitu guru Ch) yang telah secara sadar berusaha mengembangkan materi yang berhubungan kebutuhan Kota Yogyakarta. Dan satu orang guru (yaitu Guru W) yang secara tidak sadar menyinggung pembelajaran kedua aspek tersebut meskipun belum secara spesifik.

Guru Ch meminta siswa untuk mencari materi melalui media cetak dan internet dengan membuka situs 'joglosemar' di bawah arahan guru, sedangkan Guru W berusaha membidik materi budaya dan pariwisata di Indonesia dengan menggunakan brosur dan buku paduan wisata 'Indonesia Travel Planner'. Setelah itu, materi tersebut didiskusikan, baik secara individu maupun kelompok untuk pengembangan tiga keterampilan berbahasa sekaligus, yaitu membaca, menulis, dan berbicara. Kegiatan belajar semacam ini sesuai dengan konsep sebagaimana diuraikan pada Bab II laporan penelitian ini.

System penilaian dalam KBK yang menekankan pada hasil dan proses (Depdiknas, 2003: 6-7) serta pengembangan tiga aspek pembelajaran: kognitif, efektif, dan psikomotorik telah secara lengkap terakomodasi / tercakup di dalamnya

2. Usaha Guru dalam Mengembangkan Materi Pembelajaran

Dari segi hasil pengumpulan data dan analisisnya diperoleh temuan bahwa sebagian besar guru belum secara sadar mengarahkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah, yaitu menyangkut pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Materi pembelajaran menyangkut kedua aspek tersebut dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah, melalui penguasaan keterampilan berbahasa Inggris yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta., sebagian besar guru tersebut pernah membahas tentang budaya dan pariwisata secara umum. Namun pada saat diminta pertimbangan untuk pengembangan kedua aspek khusus untuk wilayah Kota Yogyakarta, semua guru pada dasarnya setuju, hanya frekuensi dan presentasinya harus dipertimbangkan mengingat focus pembelajaran tidak hanya menyangkut kebutuhan regional tapi juga Nasional dan pasar global. Untuk itu, hampir semua guru menyatakan antara 20 hingga 30 persen dari semua materi yang ada.

3. Kesepakatan Guru dalam Merelevansikan Materi Pembelajaran dan Evaluasi dengan Pelestarian Budaya dan Pengembangan Pariwisata Kota Yogyakarta

Menurut para guru, pengadaan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Kota dapat ditentukan oleh pembuat kebijakan terkait (pemerintah kota dapat didelegasikan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Inggris) atau pun diserahkan kepada guru yang bersangkutan. Tentu saja pengadaan materi tersebut memerlukan dana yang lumayan besar. Namun demikian, demi peningkatan kesadaran menyangkut pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta serta peningkatan kualitas SDM melalui materi pembelajaran yang variatif, tentunya harus ada pengorbanan.

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN

A. Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, semua SMA (lokasi penelitian) Kota Yogyakarta telah memberlakukan Kurikulum 2004 (KBK), meskipun belum semua guru menerapkan secara murni dan konsekuen, yang disusun berdasarkan rambu-rambu KBK. Hampir semua guru memanfaatkan sumber yang sama, yaitu : 'Headlight' dan 'Liked to the World'.

Kedua, tujuan pembelajaran bahasa Inggris di SMA adalah agar siswa mampu berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris secara ri'il, alami, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan Bahasa Inggris tersebut nampak pada kemampuan mereka dalam berpendapat, baik secara lisan maupun tertulis.

Ketiga, model silabus yang digunakan di SMA Kota Yogyakarta adalah silabus berbasis kompetensi (Competency-based Syllabus), bukan lagi silabus tematik pada kurikulum 1994 yang lalu. Materi pembahasan bukan ditekankan pembahasan bukan ditekankan pada pengembangan tema, melainkan pada penguasaan kompetensi berbahasa, baik secara integrative maupun terpisah. Pembangun unsur berbahasa yaitu: struktur, kosakata, lafal, dan ejaan menyatu ke dalam ketrampilan berbahasa yang sedang dikembangkan.

Keempat, jenis materi pembelajaran yang digunakan berupa (a.) tugas/tagihan, baik yang diambil dari buku teks maupun dari media massa (handouts) dan (b.) alam/benda-benda disekitar. Fungsi materi ajar tersebut adalah sebagai sarana penunjang untuk memperoleh pengalaman belajar.

Kelima, peran guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran, menyampaikan tugas, memotifasi, mengontrol kegiatan, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa. Sedangkan peran siswa adalah melaksanakan semua tugas yang dibebankan guru termasuk mencari materi pembelajaran sebagaimana dilakukan oleh tiga orang guru, (Guru W, aguru Ch, dan Guru N) dilokasi yang berbeda.

Keenam, hanya ada satu orang guru yang secara sadar mengembangkan menyangkut kedua aspek kebutuhan Kota. Tujuannya adalah demi memperkenalkan budaya Jawa dan objek/kawasan wisatanya melalui siswa yang mayoritas berasal dari luar Yogyakarta. Prosedurnya adalah: (a) mengajak siswa untuk memperoleh materi mereka sendiri melalui majalah, surat kabar, dan internet, (b) menugaskan siswa menuliskan laporan singkat tentang materi yang diperoleh, dan (c) melaporkan hasilnya dalam suatu presentasi di depan kelas. Evaluasi pembelajarannya dilakukan dengan cara mengamati proses dan hasil pembelajaran, yang dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok.

Dari keenam dimensi di atas, hanya ada lima dimensi yang nyata-nyata telah dilakukan oleh semua guru, dan relative sesuai dengan konsep KBK, namun demikian, dimensi keenam yaitu relevansi materi ajar dengan kebutuhan Kota Yogyakarta dalam kedudukan sebagai 'Kota Budaya' dan kota Pariwisata hanya (secara sengaja) dilakukan oleh seorang guru. Dengan kata lain, materi pembelajaran bahasa Inggris SMA belum relevan dengan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta.

B. Implikasi

Hasil penelitian terutama yang berkenaan dengan relevansi pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta menyiratkan perlunya kesadaran guru untuk lebih menghayati peran dan tanggung jawabnya sebagai 'model' bagi siswa. Artinya semua kegiatan dan perbuatan guru dapat dijadikan patokan bagi siswa untuk bertindak. Kenyataan dilapangan bahwa belum semua guru menerapkan kaidah-kaidah pembelajaran yang berlaku secara murni dan konsekuen.

Ada tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam melaksanakan PBM, yaitu: (1) implementasi KBK, (2) eksistensi silabus, dan (3) kreativitas guru. Ketiga hal tersebut mengindikasikan profesionalisme guru. Guru Profesional adalah guru yang aktif, kreatif dan produktif termasuk dalam menggunakan silabus (baik buatan sendiri atau lembaga) sebagai acuan dalam setiap KBM jika tidak berarti guru melakukan proses pembelajaran tanpa perencanaan. Kondisi ini terjadi karena keberadaan buku teks yang memang diusahakan memenuhi tuntutan kurikulum sedang berlaku. Pemakaian buku secara intens dapat 'mengebiri' kreatifitas siswa.

Gage dan Berliner (1984: 406-407) menegaskan bahwa guru mestinya memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan idenya secara bebas, dan dengan alasan apapun seyogyanya tidak menentukan semua materi pembelajaran secara sepihak. Jika hal ini uteraserlangsung dapat menghambat upaya peningkatan SDM Kota Yogyakarta.

C. Saran

Beritik tolak dari hasil penelitian dan implikasinya, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Untuk menghasilkan keluaran (out come) yang memiliki akseptabilitas atau keberterimaan tinggi dilingkungan tempat tinggalnya, guru hendaknya memiliki daerah/lingkungan tersebut dalam bentuk sikap 'sadar budaya' dan 'sadar wisata' kepada para siswa melalui materi pembelajaran bahasa Inggris.

Demi terwujudnya cita-cita tersebut tentunya harus di dukung oleh semua pihak terkait, terutama pemerintah Kota memfasilitasi pengadaan materi ajar bahasa Inggris yang berkaitan dengan aspek pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pengajaran serta Dinas parsenibud Kota Yogyakarta. Peran Guru dan siswa dalam aktivitas pembelajaran semacam ini perlu diusahakan seoptimal mungkin.

Oleh karena itu alasan, belum semua guru melaksanakan PBM sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah. Dengan demikian, kualitas guru yang berimbas pada kualitas outcome masih diragukan untuk itu, pihak terkait perlu meningkatkan : (1) monitoring pelaksanaan PBM secara intensif (2) penanaman sikap 'sadar budaya' dan 'sadar wisata' kota Yogyakarta pada masyarakat pembelajarui guru (3) prioritas penyediaan sarana pensisikan terutama yang terkait dengan usaha pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata, (4) insentif guru.

DAFTAR PUSTAKA

- 1985. Laporan Penelitian tentang Kepariwisata dan Organisasi Badan Pengelola Obyek Wisata di DIY. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.
- 1996. Penelitian Menyongsong Sistem Perdagangan Bebas Tahun 2020: Tantangan dan Peluang RI. Jakarta: Pulitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- .2003. Pengembangan Silabus Kurikulum Berbasis Kompetensi (KPK). Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- .2003. Standar Kompetensi Kurikulum 2004 Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMA dan Madrasah Aliyah. Jakarta: Depdiknas.
- Arifin, I. & Sunyoto, A. 1997. Rancang Bangun Studi Kasus: Kasus Tunggal, Multi Situs, dan Multi Kasus. Malang: Lembaga Penelitian Unisma Malang.
- Ary, D., Jacobs, L.C., & Razavieh, A. 1985. Introduction to Research in Education, Third Edition. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Bodgan, R.C., & Biklen, S.K. 1982. Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon.
- Djawani. 1985. Pertimbangan dan Pengembangan Bahasa Nasional sebagai salah satu Usaha Perwujudan Internasional: Makalah disajikan pada pertemuan ilmiah. Jakarta: Depdikbud
- Gage, N.L and Berliner, David C. 1984. Educational Psychology (Third Edition). Paulo Alto London: Houghton Mifflin Company Boston.
- Gunarwan, Asim. 2004. Pragmatik Kebudayaan dan Pengajaran bahasa (Makalah seminar Nasional Semantik III).Surakarta: PPS UNS.
- Ismail, Taufiq. 2002.Setelah Menguap danhun (Makalah disajikan pada pertemuan ilmiah HISKI UAD Yogyakarta, 8-9 Septembaer 2002). Yogyakarta: UAD Press.
- Koentjaraningrat. 2002. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta. Pt. Gramedia.
- Linton, Ralph. 1936. The Study of Man (An Introduction). New York: Apleton Century-Crofts, Inc.
- Madya, Suwarsih. 2003. The Substances of the English competency-Based Curriculum (A Paper Presented in tehe seminar an "The EFL CBC Application and Hindrances). Yogyakarta: UAD Press.
- McDonough, Jo. & McDonough, Steven. 1997. Research Methds for English Language Teachers. New York: St Martin's Press Inc.

STUDI TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : Aris Sustiyono, SH dan Kurdiyono

PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta dikenal memiliki banyak predikat, baik sebagai kota pendidikan, kota seni dan budaya maupun kota pariwisata. Predikat satu dan yang lainnya senantiasa saling melekat, sehingga hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karenanya, semua hal itu menjadi factor utama bagi kelangsungan dan kemajuan Kota Yogyakarta.

Pesatnya pertumbuhan Kota Yogyakarta secara langsung dan tidak langsung akan menimbulkan berbagai dampak, baik dampak social, ekonomi dan terutama tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Dengan penduduk Kota Yogyakarta yang berjumlah + 516.000 jiwa (BPS Kota Yogyakarta, 2002) serta dengan pertumbuhan penduduk 0,38 persen persepuluh tahun Kota Yogyakarta adalah kota yang padat. Luas area Kota Yogyakarta yaitu 32,50 km², sedangkan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 15.613, 14 jiwa/km² (BPS DIY, 2002). Kondisi diatas adalah fakta yang akan memberi tekanan kepada daya dukung lingkungan Kota Yogyakarta.

Lingkungan secara alami memiliki kemampuan untuk memulihkan keadaannya, yang disebut Daya Dukung Lingkungan. Pemulihan keadaannya apabila bahan pencemar berakumulasi terus menerus dalam suatu lingkungan, maka lingkungan tidak akan mempunyai kemampuan alami untuk menertalisirnya sehingga mengakibatkan perubahan kualitas lingkungan mengalami perubahan (positif atau negatif) pada suatu periode tertentu sesuai dengan interaksi komponen lingkungan (Ginting, 1988). Sehingga ketika interaksi antar komponen lingkungan tersebut tidak seimbang lagi, artinya telah melampaui daya dukung lingkungan maka kualitas lingkungan akan mengalami degradasi. Sama halnya pertumbuhan dan upaya pengembangan Kota Yogyakarta, apabila pertumbuhan dan upaya pengembangannya hanya berdasarkan perhitungan ekonomis politis saja.

Oleh karena itu, upaya mengantisipasi dampak lingkungan harus dilakukan semua pihak terutama oleh para stakeholders terkait di Kota Yogyakarta. Keterlibatan masyarakat Kota Yogyakarta juga akan menjadi kontribusi penting bagi upaya meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi sehingga dua tujuan umum pembangunan kota tercapai sebagaimana yang dikemukakan Page and Seyfried (1970) yang dikutip Zuer'aini S I, yaitu untuk mencapai kehidupan yang layak dan menghapuskan kemelaratan serta untuk mendapatkan dukungan lingkungan yang efisien yaitu menyenangkan, nyaman dan menarik dapat dicapai.

DEGRADASI LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA

Fakta-fakta pencemaran dan degradasi lingkungan yang terjadi di Kota Yogyakarta sudah banyak diungkap oleh berbagai kalangan. Penelitian terkait di Kota Yogyakarta. Penelitian terkait pembuangan sampah ke sungai yang berada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya yang meliputi sungai Bedog-Bayam, Deggung-Winongo, Code, Belik, Pelang-Gajahwong, Tambakbayan-Grojogan-Meruwe, oleh Good Governance on Water Resources Management (GGWRM) – Uni Eropa yang bekerjasama dengan Lestari Indonesia dan Walhi DIY, menunjukkan terdapat 266 titik lokasi pembuangan sampah ke sungai. Masih terkait sampah, data DKKP Kota Yogyakarta menunjukkan produksi sampah Kota Yogyakarta mencapai 1700m³/hari dengan jumlah sampah terangkut 1.300m³/hari itu berarti ada sampah sekitar 400 m³/hari yang tidak terangkut ke TPA yang berisiko mencemari lingkungan Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Depkes terhadap sungai Gajahwong, Code dan Winongo yang dilakukan November 2003 menunjukkan pencemaran berat e-coli. Di sungai Winongo misalnya, kandungan coliform tertinggi mencapai 920 juta/ml padahal ambang batasnya hanya 10.000/ml. sementara colitinja mencapai 540 juta/ml, jauh diatas ambang batasnya yang hanya 2.000/ml.

Hasil penelitian dosen fakultas Biologi UGM, Andhika Puspito Nugroho yang dilakukan pada tahun 2003, menunjukkan rata-rata derajat keasaman (pH) air hujan di Kota Yogyakarta mencapai 5,7 padahal ambang batasnya hanya 5,5. Ini menunjukkan air hujan di Yogyakarta sangat asam yang berdampak pada produktivitas tumbuhan bahkan mematikan tumbuhan dan biota air. (Kompas Jogja, 8/1/05)

GAMBARAN UMUM

Laporan penelitian ini menampilkan deskripsi mengenai tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait dengan kelestarian lingkungan hidup di kota Yogyakarta. Disamping itu penelitian ini dilakukan dalam rangka menggali perspektif masyarakat terkait dengan peran masyarakat sendiri dan utamanya peran pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Yogyakarta serta memberikan informasi kepada khalayak terkait dengan urgensi pelestarian lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. Laporan penelitian ini terdiri dari empat bagian:

1. Perspektif Masyarakat Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta
2. Pendidikan Lingkungan; Informasi Lingkungan Hidup
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup
4. Aktivitas (Kebiasaan) Masyarakat

METODOLOGI

Penelitian dilakukan dalam rentang waktu selama 4 bulan yang dimulai sejak tanggal 13 Agustus 2005 sampai dengan 13 November 2005. penelitian dilakukan di lima wilayah kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta berdasar Tipologi masing-masing wilayah serta mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yaitu di Kecamatan Kotagede Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Tegalrejo dan kecamatan Jetis dengan mengambil 200 orang sebagai responden. Pengambilan responden dilakukan secara acak dengan pertimbangan persebaran merata di masing-masing wilayah lima kecamatan tersebut. Sample terdiri dari mereka yang berusia diatas 17 tahun. Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner dan cek list observasi lingkungan fisik sekitar responden. Tingkat kepercayaan 95 persen. Ambang kekeliruan adalah 5 persen.

TEMUAN KUNCI

Secara sekilas peneliti mendapatkan bahwa ternyata masyarakat mengetahui bagaimana dampak positif dan negative yang ditimbulkan apabila lingkungan hidup terjaga kelestariannya atau sebaliknya, ada beberapa temuan kunci yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah:

1. Masyarakat Kota Yogyakarta merasakan bahwa kondisi lingkungan hidup di Kota Yogyakarta dimasa lalu lebih nyaman dari sekarang. Ada sekitar 87,5 % responden yang menyatakan demikian. Artinya, kondisi lingkungan di Kota Yogyakarta pada saat ini sudah sangat menurun kualitasnya, sehingga masyarakat merasa kurang nyaman. Factor-faktor penyebab ketidaknyamanan masyarakat disebabkan oleh beberapa alasan, yakni kebisingan, panas, pengap, kotor, ketidakaturan, dan kepadatan penduduk. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta harus segera melakukan upaya-upaya pencegahan kerusakan maupun perbaikan kondisi lingkungan di Kota Yogyakarta secara sistematis dan komprehensif.
2. masyarakat juga masih banyak yang menyatakan kurang puas terhadap apa yang dilakukan Pemkot Yogyakarta (57%). Memang tidak ada alasan yang cukup spesifik untuk mendukung

- pernyataan tersebut, akan tetapi secara umum masyarakat belum cukup merasakan perubahan signifikan dari apa yang dilakukan pemerintah dibidang lingkungan.
3. permasalahan lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Hanya saja masing-masing pihak harus menjalankan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sekitar 64% dari responden menyetujui bahwa keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada evaluasi kegiatan akan sangat membantu dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, Pemkot Yogyakarta diharapkan dapat memediasi kepentingan serta partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah.
 4. Keterlibatan semua pihak baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, LSM atau pihak-pihak lain akan sangat bermanfaat bagi upaya mengatasi persoalan-persoalan lingkungan. Sekitar 93% responden meyakini hal tersebut sebagai kunci keberhasilan didalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, Pemkot Yogyakarta diharapkan dapat menjadi inspirator untuk melibatkan semua pihak didalam menjalani program pemerintah.
 5. meskipun Pemkot Yogyakarta sudah cukup banyak menjalankan program-program terkait dengan pelestarian lingkungan akan tetapi masyarakat masih menilai program-program tersebut kurang berhasil (65%). Program pemerintah hanya bersifat kuantitatif saja dan belum kualitatif, sehingga masyarakat melihat itu belum banyak menjawab persoalan lingkungan di Kota Yogyakarta.
 6. Sebagian masyarakat Kota Yogyakarta masih sangat membutuhkan informasi tentang kondisi lingkungan hidup Kota Yogyakarta (94%). Oleh karena itu Pemkot Yogyakarta perlu melakukan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat sehingga hal itu akan meningkatkan pengetahuan dan juga wawasan masyarakat terhadap persoalan lingkungan hidup.
 7. pelestarian lingkungan di Kota Yogyakarta masih perlu digalakkan agar kondisinya menjadi lebih baik atau minimalnya tidak rusak, demikian pernyataan responden yang mencapai 87,5%. Untuk itu, Pemkot Yogyakarta diharapkan terus mendorong berbagai pihak untuk turut serta dalam tindakan nyata melestarikan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.
 8. masyarakat Kota Yogyakarta juga meyakini bahwa ketika kerusakan lingkungan terjadi maka kualitas lingkungan hidup juga dapat terganggu (89,5%). Sehingga upaya pelestarian lingkungan menjadi sebuah kewajiban bersama tanpa terkecuali. Semua pihak mestinya bahu membahu didalam mencegah maupun memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.
 9. Kebutuhan atas informasi tentang lingkungan masih sangat tinggi, setidaknya hal ini tercermin dari jumlah responden yang menyatakan sangat membutuhkan informasi tentang lingkungan hidup yang mencapai 94%. Oleh karena itu Pemkot Yogyakarta sangat diharapkan untuk senantiasa menyampaikan informasi kepada masyarakat secara kontinyu. Dengan begitu kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup di Kota Yogyakarta semakin meingkat. Jika semua elemen sudah memiliki kepedulian yang merata terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup maka menciptakan Kota Yogyakarta sebagai Kota Ramah Lingkungan bukanlah suatu yang sulit untuk diwujudkan secara bersama-sama.
 10. Upaya penyadaran masyarakat sangat efektif dilakukan dengan mengadakan pertemuan warga secara berkala. Sekitar 54,5% responden menyatakan kesetujuannya atas upaya seperti itu. Hal ini dikarenakan pertemuan warga dapat secara langsung digunakan sebagai wahana penyampaian bernagai informasi tentang lingkungan kepada masyarakat disisi lain bagi masyarakat sendiri pertemuan warga dapat dijadikan ajang mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan secara langsung. Dengan demikian distribusi informasi dapat sampai tepat pada sasaran.
 11. Kepedulian Masyarakat Kota Yogyakarta dapat dilihat dari tingkat swadaya didalam membuat sarana dan prasarana lingkungan yang mencapai angka 53,5%. Hal ini apabila dikelola dengan benar sesungguhnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk berkilah memojokan masyarakat sebagai kambing hitam apabila ada perusakan lingkungan. Fungsi utama dari kerja pemerintah adalah manajemen kebijakan, jika hal itu dilakukan dengan benar maka tidak akan terjasdi pernyataan saling menyalahkahn yang cenderung dikotomis antara satu dan yang lainnya.

12. Masyarakat Kota Yogyakarta lebih memilih kendaraan bermotor pribadi, setidaknya hal itu dapat dilihat dari jumlah responden yang menentukan pilihannya seperti mencapai 69,5%. Dan hanya 12% responden yang memilih transportasi umum didalam aktifitas kesehariannya. Apabila pemerintah tidak segera menerapkan system transportasi masal maka laju pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor akan meningkat secara signifikan. Hal itu akan beresiko mengganggu kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta.

REKOMENDASI

1. Upaya peningkatan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait dengan urgensi kelestarian lingkungan hidup harus terus dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme yang paling efektif dirasakan dan diterima masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat harus diutamakan dalam setiap perencanaan program hingga pasca program. Sehingga partisipasi masyarakat tidak diartikan secara sempit dengan hanya melibatkan pada waktu program berjalan. Hal semacam itu hanya akan menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Pola lama yang menganut system top down harus diganti dengan mekanisme bottom up dengan demikian tingkat resiko kegagalan sebuah program yang dijalankan dapat diminimalisir secara terencana.
3. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah ketika melakukan sesuatu kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian kebijakan yang diambil akan dapat berjalan secara efektif karena mendapat dukungan dari masyarakat yang bersangkutan.
4. Opini masyarakat yang menyatakan kurang puasannya terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah mensiratkan kebutuhan evaluasi komprehensif terhadap program-program yang telah dijalankan termasuk proses bagaimana program tersebut muncul.
5. Upaya pendidikan lingkungan bagi masyarakat Kota Yogyakarta hendaknya biasa diupayakan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada.
6. Pemerintah perlu melakukan inovasi-inovasi didalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Karena seiring berjalannya waktu permasalahan lingkungan perkotaan juga akan semakin kompleks. Dinamika masyarakat yang terus berkembang senantiasa akan melahirkan persoalan-persoalan baru yang perlu diantisipasi sedini mungkin.
7. Perbaikan dan penambahan sarana pendukung mutlak segera dilakukan. Sebagai contoh misalnya ialah perbaikan system transportasi misal dalam rangka meminimalan pencemaran udara serta penambahan infrastruktur dalam menangani masalah sampah.
8. Transparansi anggaran pengelolaan lingkungan Kota Yogyakarta, termasuk retribusi sampah menjadi hal yang juga perlu diperhatikan Pemkot Yogyakarta. Hal ini untuk menghindari miss communication dengan masyarakat.

PENCIPTAAN IKLIM LINGKUNGAN PEMBELAJARAN YANG INKLUSIF MELALUI PENETAPAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SD NEGERI TAMANSARI 1 YOGYAKARTA.

Oleh : sri Muji Rahayu, S.Pd, M.Pd, dan Asti Sudaryani, S.Pd

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Mayoritas anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan layanan pendidikan yang layak sebagaimana mestinya, sehingga mereka rawan putus sekolah.

Pemerintah berusaha memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dengan mencanangkan penyelenggaraan pendidikan inklusi, dengan membentuk Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI). Pendidikan inklusi adalah suatu sistem pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan siswa tanpa membeda-bedakan anak yang berasal dari latar belakang apapun, maupun perbedaan kondisi fisik atau mental.(Unesco, 2004)

Di kota Yogyakarta terdapat dua SD yang menjadi uji model penyelenggaraan system pendidikan inklusi, yaitu SD Negeri Tamansari 1 dan SD negeri Giwangan. Pemilihan SD Negeri Tamansari 1 sebagai tempat penelitian karena di SD tersebut terdapat banyak anak berkebutuhan khusus, yang dikategorikan dalam keterbelakangan fisik dan mental.

Karena adanya sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusi ini, dinas Pendidikan Provinsi DIY memberikan bantuan guru pendamping khusus untuk mendampingi proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Penyiapan wahana agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar dengan nyaman bersama dengan teman-temannya tidak cukup dengan hanya menyediakan guru pendamping khusus. Untuk itulah, dirasa perlu dilaksanakan penyelenggaraan Manajemen Berbasis sekolah (MBS) yang berperspektif inklusi. Hal ini penting karena sampai saat ini sangat sedikit pengelola sekolah yang memiliki keberanian menetapkan pelaksanaan MBS di sekolahnya, padahal penerapannya memiliki dasar hukum yang kuat.

2. Rumusan Masalah

Apakah penetapan penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah dapat menciptakan iklim lingkungan pembelajaran yang inklusif?

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian pembelajaran yang inklusif
2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

C. Hipotesa

Dengan penetapan penyelenggaraan Manajemen berbasis kompetensi dapat menciptakan iklim lingkungan pembelajaran yang inklusif.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan agar:

1. Terciptanya iklim pembelajaran yang inklusif melalui penyelenggaraan Manajemen Berbasis sekolah (MBS).
2. Di dapatkan temuan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan model penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif.

E. Manfaat Penelitian

1. untuk proses penerbitan kebijakan tentang keberadaan dan kewenangan Sekolah Pelenggaraan Pendidikan Inklusi yang sampai sekarang merupakan kebutuhan yang mendesak.
2. Untuk menumbuhkan keberanian para pengelola sekolah untuk menetapkan pelaksanaan MBS sebagai kebijakan sekolah.
3. Untuk penyelenggaraan kajian replikasi model sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi guna perluasan pemenuhan hak asasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

F. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif yang berbentuk action research.

Data diperoleh melalui observasi, focus group discussion dan isian daftar pertanyaan terbuka. Treatment atau intervensi dengan pengenalan MBS melalui workshop bagi warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan Komite Sekolah). Untuk siswa, dilakukan dengan simulasi pendampingan.

Pengolahan data menggunakan analisis diskriptif kualitatif perhitungan tendensi sentral.

G. Hasil dan Pembahasan

Dari pengumpulan data diperoleh hasil bahwa sekolah dalam menyusun program sekolah belum menggunakan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Kebutuhan dan keberadaan anak berkebutuhan khusus belum dimasukkan dalam program sekolah. Anak berkebutuhan khusus mendapatkan kurikulum, materi, dan evaluasi yang sama dengan anak reguler. Pendampingan dilakukan sebatas dalam hal kesulitan belajar, dan belum dalam bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sekolah. Keberadaan Anak berkebutuhan khusus belum diterima oleh teman sekolahnya. Sarana dan prasarana belum aksesibilitas. Hasil observasi juga menemukan bahwa SD Tamansari I Yogyakarta sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) hanya ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan belum ada legalitas atau surat keputusan yang berkekuatan hukum.

Dari hasil temuan di atas kemudian dilakukan workshop pengenalan pelaksanaan MBS untuk menyusun program sekolah secara partisipatorik sesuai dengan prinsip MBS dan mendorong sekolah untuk memasukkan keberadaan Anak berkebutuhan khusus dalam program sekolah. Hal ini sangat penting karena seharusnya anak mendapatkan perlakuan sesuai dengan kebutuhan anak dan bukan anak yang harus menyesuaikan dengan sistem, hal tersebut sangat merugikan bagi anak, karena mereka tidak mampu mengikuti pembelajaran dan tidak mampu bersosialisasi sehingga terancam tidak naik kelas ataupun putus sekolah. Bagi siswa dilakukan simulasi pendampingan dengan metode permainan yang terstruktur.

Hasil setelah intervensi, sekolah mempunyai program sekolah yang disusun secara partisipatorik oleh seluruh warga sekolah. Dalam program sekolah (dituangkan dalam table action plan), keberadaan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sudah terakomodir, terlihat dari rencana tindakan untuk memodifikasi kurikulum dan materi, membuat jalan yang aksesibel bagi anak tunanetra, pelatihan untuk menggunakan metode dan alat pembelajaran sesuai kebutuhan anak, pelatihan untuk mengelola kelas inklusi, dan lain-lain. Hasil setelah simulasi, mulai ada anak yang mau memilih anak berkebutuhan khusus sebagai teman yang mereka senang.

H. Kesimpulan

Jadi hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa bila sekolah menyelenggarakan Manajemen Berbasis Sekolah yang berperspektif inklusi sebagai kebijakan atau kekuatan untuk mempengaruhi pembentukan perilaku sosial pada seluruh warga sekolah, maka iklim pembelajaran yang inklusif bisa tercipta.

Di atas itu semua, adanya kekuatan hukum atau legalitas yang jelas bagi pengelola sekolah akan menumbuhkan keberanian untuk melaksanakan otonomi sekolah. Juga, bila didukung adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis maka semakin memantapkan dalam penyusunan program sekolah terutama dalam proses belajar mengajar, keikhlasan untuk menerima sistem pendidikan inklusi sebagai pemenuhan hak bagi semua anak juga diperlukan bagi semua warga sekolah.